

**TINGKAT DAN DETERMINAN TRANSPARANSI PADA  
SITUS WEB PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN DI  
INDONESIA**



**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

TINGKAT DAN DETERMINAN TRANSPARANSI PADA SITUS  
WEB PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama: Lariza Putri Paramita

No.Mahasiswa: 16312090

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau disebut oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi apapun yang berlaku”

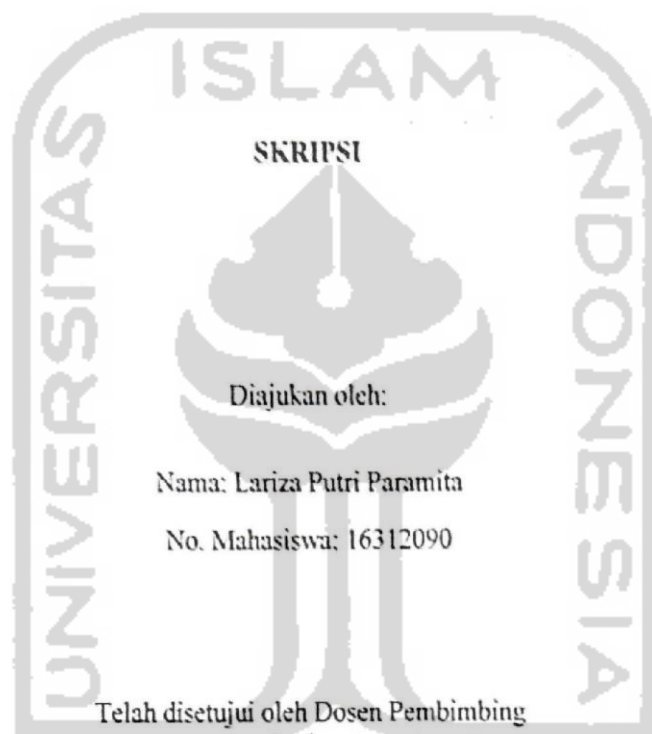
Yogyakarta, 14 Juni 2020

Penulis



(Lariza Putri Paramita)

TINGKAT DAN DETERMINAN TRANSPARANSI PADA SITUS WEB  
PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Lariza Putri Paramita

No. Mahasiswa: 16312090

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 17 JUNI 2020

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitra Roman Cahaya', is written over the text 'Dosen Pembimbing,'.

(Fitra Roman Cahaya, S.E., M.Com., Ph.D., CSRS., CSRA.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**TINGKAT DAN DETERMINAN TRANSPARANSI PADA SITUS WEB PEMERINTAH  
KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA**

Disusun Oleh : **LARIZA PUTRI PARAMITA**

Nomor Mahasiswa : **16312090**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 06 Juli 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Fitra Roman Cahaya, S.E., M.Com., Ph.D., CSRS.,  
CSRA.**

Penguji : **Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak.**



**Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.**

## MOTTO

“Selalu melibatkan Allah SWT dalam segala langkah dan urusan”

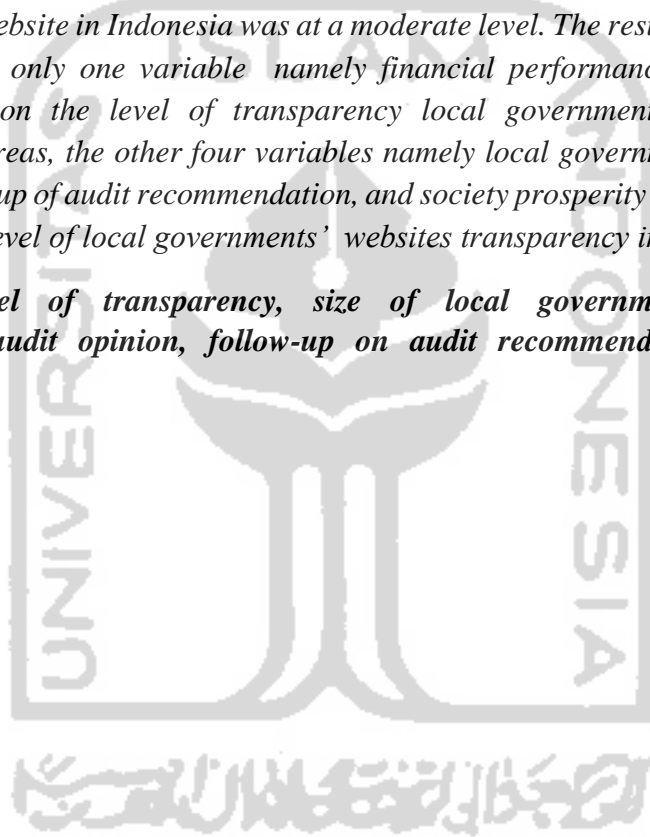


## ***Abstract***

*This study aims to analyze the level of transparency on local governments' website and examine the possible impacts of the size of local government, financial performance, audit opinion, follow-up on audit recommendations and society prosperity on that transparency level. The samples in this study consist of 64 local governments in Indonesia 2018 financial year. The hypotheses are tested by using multiple regression.*

*The results of this study show that information disclosure on local governments' website in Indonesia was at a moderate level. The results of this study also prove that only one variable namely financial performance which has a positive effect on the level of transparency local governments' websites in Indonesia. Whereas, the other four variables namely local government size, audit opinion, follow-up of audit recommendation, and society prosperity level negatively influenced the level of local governments' websites transparency in Indonesia.*

***Keywords:*** *level of transparency, size of local government, financial performance, audit opinion, follow-up on audit recommendations, society prosperity level.*



## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi pada situs web pemerintah daerah dan menguji kemungkinan pengaruh ukuran pemerintah daerah, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat terhadap tingkat transparansi tersebut. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 64 Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia pada tahun keuangan 2018. Hipotesis diuji dengan menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi di situs web pemerintah daerah di Indonesia berada di level sedang. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa hanya satu variabel, yaitu kinerja keuangan yang berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi situs web pemerintah daerah di Indonesia. Dimana, keempat variabel lainnya seperti ukuran pemda, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat berpengaruh negatif terhadap tingkat transparansi situs web pemerintah daerah di Indonesia.

**Katakunci: tingkat transparansi, ukuran pemda, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit, tingkat kemakmuran masyarakat.**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan penelitian ini yang merupakan sebuah *milestone* hanya untuk :

Kedua orang tua saya, yang menyayangi saya tiada hentinya

Bapak Hartoyo dan Ibu Rita Budiarti,

Selaku orang terpenting di hidup saya, yang senantiasa memberikan dukungan serta doa yang tidak pernah terputus agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk hari esok.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan mudah dan penuh dengan kelancaran. Shalawat serta salam kepada Nabi besar junjungan setiap umat Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita sampai sekarang dengan pedoman Al Quran dan Hadits.

Penelitian dengan judul **“TINGKAT DAN DETERMINAN TRANSPARANSI PADA SITUS WEB PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN DI INDONESIA”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya doa, motivasi dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, mama dan papa, Bapak Hartoyo dan Ibu Rita Budiarti. Terimakasih atas segala bentuk kasih dan sayang nya kepada penulis, doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kemudahan penulis dalam menimba ilmu 4 tahun ini. Terimakasih untuk motivasi serta pembelajaran yang selalu diberikan sampai penulis sedewasa ini. Semoga penulis menjadi anak yang dapat diandalkan serta dibanggakan oleh mama dan papa. Serta, semoga mama dan papa sentiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungan-Nya.
2. Ibu Suyati, selaku eyang tersayang yang selalu menanyakan kabar dan progres perkuliahan cucunya. Tak henti pula selalu memberikan nasihat-nasihat untuk bekal cucunya. Terimakasih atas doa dan cinta yang sudah diberikan, semoga eyang sehat selalu.
3. Bapak Fitra Roman Cahaya, S.E., M.Com., Ph.D., CSRS., CSRA. selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih selalu memberi arahan, masukan dan ilmu selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terimakasih

untuk kesabaran yang luar biasa dalam membimbing penulis disela-sela kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia dan seluruh jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M. Si., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
6. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika beserta jajaran pengajar Program Studi Akuntansi.
7. Giva Izzani Maulinia, Nabilla Alifiany K.P, Adelia Pratiwi dan Anisa Rahmawati selalu sahabat dekat penulis semasa SMA hingga setua ini. Terimakasih sudah selalu ada dalam kondisi apapun dan selalu berbagi keceriaan dengan penulis. Ayo sukses bareng!
8. Miranda dan Nandina, teman pertama di Yogyakarta. Terimakasih untuk canda tawa dan cerita-cerita yang sudah diberikan kepada penulis. Mari bertemu!
9. Keluarga Kelas B (Kethekur) ada: Monic, Diva, Saras, Qintan, Anggun, Dhani, Nadia, Alya, Dhimas, Dimas, Gitrafi, Erha, Zaki, Aufa, Rizky, Refa, Ahid, Fandi dan Izzul. Terimakasih telah bersama!
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2016 lainnya. Terimakasih telah berjuang bersama.
11. Keluarga LEM FBE UII, terimakasih sudah memberikan penulis kesempatan untuk berkembang dan tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu. Terimakasih untuk Bang Gheo, Mba Siti, Fina, Andri, Titis, Risyad, Farida, Maya, Zulfikar, Reza dan Aji yang sudah sabar dengan penulis dalam satu departemen.
12. Unit KKN 22 selaku teman satu atap selama 30 hari. Terimakasih sudah menerima segala kekurangan penulis dalam hidup bersama. Senang bertemu kalian.

13. Alya Salmaa Dewi, teman penulis dari kelas B hingga detik-detik terakhir skripsi ini selesai. Terimakasih selalu bersama, saling menguatkan dan memotivasi satu sama lain. Selamat alya, kita bisa!
14. Sheera Novenia Syanindita dan Amalia Daniesa Nufiandari selaku teman ter-*absurd* sepanjang masa. Terimakasih atas curhatan dan sambatan yang tidak jelas selama ini.
15. Mochammad Faried Rachman Hakim, S.Ked. selaku sahabat penulis yang selalu mendukung dikala susah dan senang. Terimakasih atas usaha yang sudah diberikan walau tidak memberi hasil yang diinginkan. Semoga selalu sukses sampai menjadi dokter spesialis yang profesional. Doa ku bersama mu. Sampai bertemu dilain kesempatan yang lebih baik lagi!

Terimakasih untuk semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga kebaikan yang kalian berikan kepada penulis selama ini mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima semua kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak. Akhir kata,

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Yogyakarta, 14 Juni 2020

Penulis

Lariza Putri Paramita

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BERITA ACARA .....	v
MOTTO .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Abstrak .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian .....	8
1.5    Sistematika Penulisan .....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1    Landasan Teori.....	11
2.1.1    Teori Agensi .....	11
2.1.2    Tingkat Transparansi .....	13
2.1.3 <i>E-Government</i> .....	15
2.1.4    Pelaporan Keuangan .....	16
2.1.5    Pemerintah Daerah.....	18

2.2	Telaah Penelitian Terdahulu .....	19
2.3	Pengembangan Hipotesis .....	26
2.3.1	Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah .....	26
2.3.2	Hubungan Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah .....	28
2.3.3	Hubungan Opini Audit terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah .....	29
2.3.4	Hubungan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah .....	30
2.3.5	Hubungan Tingkat Kemakmuran Masyarakat terhadap Tingkat Transparansi Pemerintah Daerah .....	31
2.4	Kerangka Pemikiran .....	33
BAB III .....		35
METODE PENELITIAN .....		35
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	35
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	36
3.2.1	Data Sekunder .....	36
3.3	Definisi Variabel Operasional Penelitian .....	36
3.3.1	Variabel Dependen .....	37
3.3.2	Variabel Independen .....	38
3.4	Metode Analisis Data .....	41
3.4.1	Statistik Deskriptif .....	42
3.4.2	Uji Asumsi Klasik .....	42
3.4.3	Analisis Regresi Berganda .....	44
3.4.4	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	45
3.4.5	Uji Signifikan Parsial (Uji T) .....	45
3.4.6	Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	45
BAB IV .....		47
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....		47
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian .....	47
4.2	Analisis Statistik Deskriptif .....	50
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen .....	51

4.2.2	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Independen .....	51
4.3	Uji Asumsi Klasik .....	54
4.3.1	Uji Normalitas .....	55
4.3.2	Uji Multikolinearitas .....	60
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	61
4.4	Analisis Regresi Berganda .....	63
4.5	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	65
4.6	Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	66
4.7	Pembahasan .....	67
BAB V .....		74
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN .....		74
5.1	Simpulan .....	74
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	74
5.3	Saran .....	75
5.4	Implikasi .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....		76



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Data Kabupaten dan Kota.....	47
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Tingkat Transparansi.....	51
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Independen.....	52
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Untuk Data Kategorikal.....	54
Tabel 4.5 Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.6 Uji Normalitas Setelah Transformasi.....	57
Tabel 4.7 Uji Normalitas Setelah <i>Outliers</i> .....	59
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas.....	61
Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda.....	64
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	66
Tabel 4.12 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	66
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	20
Gambar 4.1 Histogram Sebelum Transformasi.....	56
Gambar 4.2 Histogram Setelah Transformasi.....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SAMPEL FINAL.....	79
LAMPIRAN 2 TABULASI VARIABEL INDEPENDEN.....	81
LAMPIRAN 3 TABULASI VARIABEL DEPENDEN.....	93
LAMPIRAN 4 <i>OUTPUT</i> SPSS.....	96
LAMPIRAN 5 VERIFIKASI DATA.....	104



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan roda pemerintahan, setiap kepala pemerintah selalu berusaha untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat atas kinerjanya saat menjalankan roda pemerintahan itu. Dampak positif atas kinerja pemerintah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah, tingkat kemakmuran masyarakat atas suatu wilayah, ataupun pemanfaatan yang baik terhadap sumber daya yang ada di suatu wilayah pemerintahan. Tentunya tujuan pemerintah seharusnya bukan untuk menciptakan citra yang baik kepada masyarakat, akan tetapi bagaimana pemerintah dapat sepenuhnya bertanggungjawab atas apa yang didapat dari masyarakat, mengolahnya hingga mengembalikannya lagi kepada masyarakat. Artinya, diharapkan untuk setiap lembaga pemerintah agar tidak hanya mencari citra positif dari masyarakat, melainkan juga memberikan tanggungjawab kepada masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah dapat berupa pelayanan yang baik kepada masyarakat, dimana sekarang ini masyarakat sedang hangat-hangatnya membahas mengenai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Dengan adanya sentimen publik yang muncul mengenai pelayanan masyarakat mau tidak mau pemerintah harus selalu mengevaluasi dan membenahi pelayanannya agar semakin meningkat dan berkualitas.

Dengan adanya transparansi yang gencar digaungkan oleh pemerintah sekarang ini, tidak terlepas dari adanya inisiasi terbitnya Undang-Undang No 17.

Tahun 2003 yang memberikan dampak besar bagi pengelolaan keuangan Negara Indonesia. Dalam pasal 3 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan adanya gelombang *New Public management* (NPM), Indonesia juga melakukan reformasi terhadap Keuangan Negara. Dengan melakukan reformasi terhadap Keuangan Negara dipercaya dapat mengarahkan Indonesia ke arah pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. Akuntabilitas dan transparansi tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut beriringan dengan adanya tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah (Pramudiarta, 2015).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan transparansi dengan merealisasikannya melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008). Pada pasal 9 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi publik yang dimaksud yaitu informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik yang terkait serta informasi mengenai laporan keuangan. Selain itu, pada pasal 7 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga ditekankan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik yang

akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Tujuan dari adanya perundang-undangan tersebut ialah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah selama satu tahun anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kemudian, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Suwardjono (2005) mengungkapkan bahwa informasi yang bermanfaat bagi para pengguna adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi yang ada akan menjadi manfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pengguna yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah ajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Menurut Halim (2004) pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan adalah suatu bentuk pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak

diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Dengan informasi tersebut, pemerintah harus mau dan mampu untuk menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Pemerintah daerah dianggap mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi jika dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu: (1) relevan, yang berarti apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu; (2) andal, berarti informasi yang tercantum didalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur, serta dapat diverifikasi; (3) dapat dibandingkan, yang artinya informasi yang ada dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya; (4) dapat dipahami, artinya informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Informasi yang diberikan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan nilai informasi yang tertuang didalam undang-undang. Apabila informasi di dalam laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan karakteristik kualitatif yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, artinya pemerintah daerah sudah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Apabila informasi yang disajikan tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga dibutuhkan untuk tercapainya fungsi pengawasan serta pencegahan atas tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan sumber daya yang dapat merugikan negara. Pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari ketersediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi tersebut. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perhatian masyarakat berkembang terhadap adanya peningkatan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi kepada publik dengan cara yang mudah dijangkau dan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia juga didukung dengan teknologi, dimana pemerintah memberikan informasi nya kepada publik melalui situs atau laman resmi pemerintah di internet.

Dengan menggunakan internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang diinginkan nya. Styles dan Tennnyson (2007) menyatakan bahwa internet merupakan media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling murah bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya. Dengan penggunaan internet di Indonesia untuk mempublikasikan informasi dapat membantu dalam menyukseskan program *e-government*. Pemanfaatan internet ini dapat membuat pekerjaan suatu institusi semakin efektif dan efisien. Selain itu, internet bisa menawarkan kemungkinan peningkatan interaksi antara pemerintah daerah selaku administrasi publik dengan masyarakatnya (Chadwick, 2003).

Penelitian ini merujuk pada jurnal dengan judul *Transparency Of Local Government In Indonesia* yang disusun oleh I Made Pradana Adiputra, Sidharta Utama dan Hilda Rossieta (2018), dengan menggunakan variabel bebas yang sama yaitu transparansi pemerintah daerah. Namun, penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) dari 3 (tiga) variabel independen yang dipakai dalam penelitian Adiputra, *et al* (2018). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada jurnal dengan judul *Financial Statements Disclosure On Indonesian Local Government Websites* yang disusun oleh Wahyudin Nor, Muhammad Hudaya dan Rifqi Novriyandana (2019). Namun, penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) dari 6 (enam) variabel independen yang dipakai dalam penelitian tersebut. Tidak hanya kedua jurnal tersebut, penelitian ini juga merujuk pada jurnal dengan judul Pengaruh Ukuran Pemda, *Leverage* dan Kinerja Keuangan Terhadap *IFR* Pada Pemda Dengan Dimoderasi Opini Audit yang disusun oleh Shanti R.H.Nufus, Titiek Herwanti dan Budi Santoso (2019).



Dengan jurnal tersebut, penelitian ini hanya menggunakan 1 (satu) dari 5 (lima) variabel independen yang ada didalam penelitian tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan analisis faktor, untuk mencari indikator yang tepat untuk digunakan pada variabel ukuran pemerintah daerah, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekoemndasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah. Sehingga, judul penelitian ini adalah **“Tingkat dan Determinan Transparansi pada Situs Web Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Seberapa luas tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh pada tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web?
3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web?
5. Apakah tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web?

6. Apakah tingkat kemakmuran masyarakat berpengaruh terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web.
2. Menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web.
3. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web.
4. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web.
5. Menganalisis pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web.
6. Menganalisis pengaruh tingkat kemakmuran masyarakat terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dalam bidang sektor publik terutama mengenai pengaruh-pengaruh tingkat transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

## 2. Manfaat secara Praktik

Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta saran mengenai tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perbaikan kinerja yang dapat menunjang tingkat transparansi.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori terkait transparansi, ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

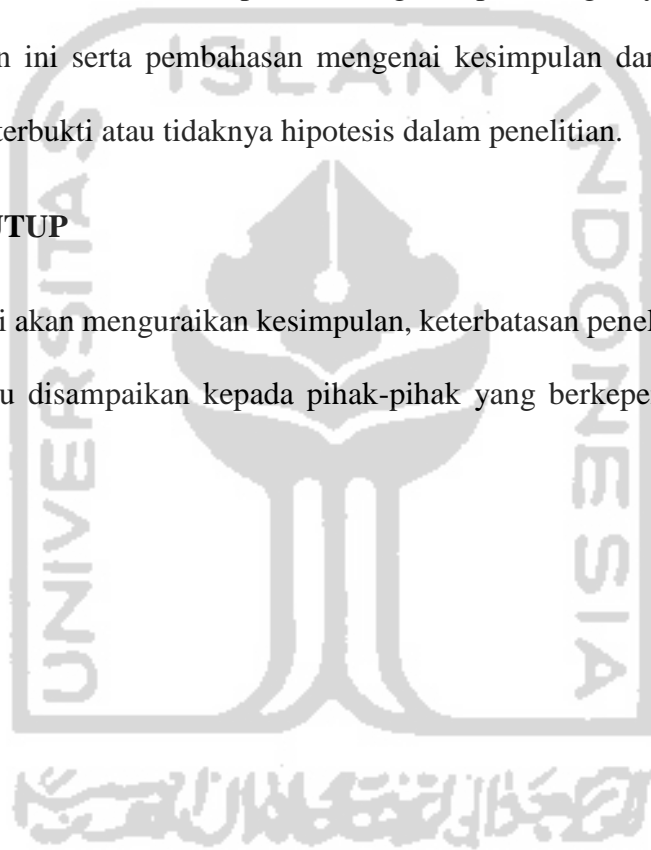
Pada bab ini akan menguraikan mengenai penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan mendeskripsikan mengenai perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini serta pembahasan mengenai kesimpulan dari penelitian ini mengenai hasil terbukti atau tidaknya hipotesis dalam penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai landasan teori penjelasan mengenai transparansi, *e-government*, pelaporan keuangan, dan pemerintah daerah. Selain itu penulis akan menguraikan telaah penelitian terdahulu yang terkait, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

#### 2.1 Landasan Teori

Landasan teori yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu teori agensi. Adapun pengertian teori agensi akan di uraikan dibawah ini.

##### 2.1.1 Teori Agensi

Menurut Godfrey (2010) pengertian dari teori keagenan adalah teori yang membahas mengenai hubungan kontratual antara *principal* dan agen. Dimana antara *principal* dan agen masing-masing memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan dan tidak ada alasan untuk mempecayai agen yang akan selalu bertindak sesuai keinginan *principal*. Oleh karena itu, akan timbul biaya agen untuk memberikan keyakinan pada *principal*.

Mardiasmo (2004) juga menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri

dari dua macam, yaitu: 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).

Dengan adanya perbedaan kepentingan pasti akan muncul sebuah konflik di dalamnya. Seperti yang dikemukakan oleh Rosalin (2011) dalam Nurillah (2014), yang menyatakan bahwa berkaitan dengan masalah keagenan, praktik pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Adanya masalah keagenan dapat menimbulkan suatu asimetri informasi antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Dalam praktik pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Oleh karena itu, salah satu cara organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan menyajikan keterbukaan informasi pada masyarakat dengan melaporkan laporan keuangan maupun hasil kinerjanya. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar masyarakat memiliki keyakinan yang cukup terhadap pemerintah selaku prinsipal. Seperti yang dikemukakan oleh Scott (1997), bahwa kemampuan bertahan

organisasi ditentukan oleh bagaimana menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan.

### **2.1.2 Transparansi**

Transparansi dalam istilah politik berarti pertanggungjawaban dan keterbukaan. Transparansi merupakan salah satu dari lima asas yang perlu dilakukan oleh pemerintah menurut pedoman *good public governance*. Secara umum, transparansi mengandung unsur pengungkapan sebagai penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses. Salah satu contoh transparansi dari pemerintah yaitu adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat diakses kapan saja.

Kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dikelola dan dimiliki pemerintah merupakan salah satu hal yang kerap menjadi perbincangan masyarakat. Dengan adanya kemudahan mengakses segala informasi yang diinginkan, sentimen publik juga mengarah kepada kemudahan mengakses informasi yang dimiliki pemerintah. Transparansi merupakan salah satu *key element* di dalam *good governance* yang dapat berupa kemudahan akses dan kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan publik. Folscher (2000) dalam Medina (2012) menungkapkan keuntungan dari adanya transparansi:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang dapat memberikan kontribusi terhadap adanya stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir.

2. Dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah agar para pejabat publik dapat berlaku lebih bertanggungjawab mengenai keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik sehingga dapat mencegah jika adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Transparansi sendiri dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat.
4. Meningkatkan investasi terhadap pemerintah. Karena adanya transparansi, pemangku kepentingan mendapat pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan yang pemerintah lakukan sehingga dapat mengundang investor dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak terhadap pemerintah.

Menurut Medina (2012), prinsip transparansi dapat dilihat dari dua aspek, yakni komunikasi kepada publik dan adanya hak masyarakat untuk mengakses informasi dari pemerintah. Untuk memenuhi kedua aspek tersebut, pemerintah harus bersedia untuk terus memperbaiki kinerjanya. Pemerintah dapat menggunakan media berupa internet untuk memberikan informasi keuangan dan non keuangan pada masyarakat secara transparan. PP No.3 Tahun 2007 juga menyebutkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi kinerjanya melalui situs resmi pemerintah daerah. Peran internet sendiri dapat diartikan sebagai kesempatan untuk berkomunikasi kepada publik dan juga sebagai “*watchdog*” terhadap



tindakan-tindakan pemerintah terhadap perilaku yang menyimpang dari otoritas sebuah pemerintahan.

### **2.1.3 E-Government**

Berdasarkan instruksi presiden No.3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, setiap pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. *E-government* atau *Electronic government* merupakan proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) untuk memberikan kemudahan komunikasi dan transaksi kepada masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya (Hartono, 2010).

Menurut Moon (2002), *e-government* memiliki lima aspek utama yaitu: (1) interaksi antar lembaga pemerintah, (2) pelayanan berbasis internet, (3) *e-commerce*, (4) adanya demokrasi secara digital untuk akuntabilitas pemerintah yang lebih transparan, dan (5) *e-finance*. Salah satu fokus utama dari *e-government* adalah menghubungkan antara negara dengan masyarakat serta supremasi hukum. Gupta *et al* (2008) dalam Rora (2010) menyatakan keuntungan bagi pemerintah yang mengimplementasikan *e-government*:

1. Dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses terhadap publik, akuntabilitas, transparansi maupun *citizen empowerment*.
2. Dapat menurunkan biaya dan waktu untuk melakukan pelayanan publik. Karena media yang dipakai sangat mudah untuk dikelola dan dioperasikan.
3. Memberikan keuntungan strategik contohnya dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan melalui informasi yang tersedia, meningkatkan interaksi terhadap penduduk dengan pemerintah nya, meningkatkan kekuatan masyarakat untuk memaksa pemerintah memiliki hubungan yang baik dengan sektor swasta dan dapat meningkatkan kemampuan untuk memberikan efek yang baik terhadap *organizational change management*.

#### **2.1.4 Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan di laporan keuangan. Pelaporan keuangan sendiri merupakan bentuk pengungkapan informasi keuangan. Pelaporan keuangan bertujuan untuk mengupayakan adanya informasi yang luas untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dan melayani kepentingan umum dari berbagai pengguna, bukan hanya untuk kebutuhan kelompok tertentu saja (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2007). FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi mengenai semua kondisi dan kinerja suatu entitas

dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang disampaikan melalui laporan keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan informasi mengenai keuangan pemerintah daerah yang disediakan dan dilaporkan (Medina, 2010). Menurut PP No. 56 tahun 2005 Pasal 3, informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur di dalam informasi keuangan daerah berdasarkan pada PP No. 56 tahun 2005 yang pada pelaksanaannya disampaikan oleh daerah kepada pemerintah yaitu:

1. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Neraca Daerah
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
7. Data-data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Instruksi Mendagri Nomor 188.52/179/SJ, mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikkan informasinya melalui situs masing-masing Pemda. Ada 12 dokumen keuangan yang disebutkan dalam instruksi tersebut antara lain: (1) Ringkasan RKA SKPD, (2) Ringkasan RKP PPKD,

(3) Rancangan Perda APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Ringkasan DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) Opini BPK atas LKPD.

### **2.1.5 Pemerintah Daerah**

Struktur pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Sehingga, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Secara umum pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang dapat menjalankan, mengatur hingga menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Adapun fungsi pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pengelolaan daerah juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyebutkan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah juga sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah. Dengan adanya pemisahan wewenang dan tanggungjawab tersebut diharapkan dapat terlaksananya mekanisme *check and balances* (Pramudiarta, 2015) serta dapat mendorong adanya profesionalisme dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Penatausahaan keuangan daerah juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan karena keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

## **2.2 Telaah Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini dan berhubungan dengan pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah:

**Tabel 2.1 Telaah Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Topik Penelitian	Teori	Variabel	Hasil/Kesimpulan
1.	Nor et al (2019)	<i>Financial Statements Disclosure on Indonesian Local Government Websites</i>	1. Teori Agensi 2. <i>Learning organization theory</i>	Dependen: Pengungkapan laporan keuangan Independen: -opini audit -temuan audit -tindak lanjut rekomendasi audit -tingkat edukasi -tingkat kemakmuran -komitmen kepala daerah	1. Opini audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs Pemda  2. Temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, tingkat pendidikan, tingkat kemakmuran dan komitmen kepala daerah tidak mempunyai pengaruh yang

					signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs Pemda.
2.	Adiputra et al (2018)	<i>Transparency of Local Government in Indonesia</i>	1. Teori Institusional 1 2. Teori Agensi 3. Teori Legitimasi	Dependen: Keterbukaan informasi pemerintah daerah  Independen: -ukuran pemda -kualitas laporan keuangan pemda -tingkat respon pemda -lingkungan politik	1. Kualitas laporan keuangan Pemda dan lingkungan politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterbukaan informasi Pemda.  2. Ukuran Pemda dan tingkat respon Pemda tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterbukaan informasi Pemda.

3.	Nufus <i>et al</i> (2019)	Pengaruh Ukuran Pemda, <i>Leverage</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap <i>IFR</i> Pada Pemda Dengan Dimoderasi Opini Audit	Teori <i>Stewardship</i>	Dependen: <i>IFR</i>  Independen: -ukuran pemda - <i>leverage</i> -kinerja keuangan  Moderasi: Opini audit	1. Ukuran Pemda dan Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>IFR</i> di Indonesia. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>IFR</i> di Indonesia. 3. Opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan ukuran Pemda, <i>leverage</i> , dan kinerja keuangan dengan <i>IFR</i> di Indonesia.
4.	Nosihana dan Yaya (2016)	<i>Internet Financial Reporting</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia	1. Teori Agensi 2. Teori <i>Stewardship</i>	Dependen: <i>IFR</i>  Independen: -kompetisi politik -ukuran pemda - <i>leverage</i>	1. Kompetisi politik dan ukuran Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap <i>IFR</i> di Indonesia.



				<ul style="list-style-type: none"> <li>-kekayaan pemda</li> <li>-tipe pemda</li> <li>-opini audit</li> </ul>	<p>2. <i>Leverage</i>, kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap IFR di Indonesia.</p>
5.	Nainggolan dan Purwanti (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Keagenan</li> <li>2. Teori Signalling</li> </ol>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengungkapan informasi keuangan</li> <li>-aksesibilitas informasi keuangan</li> </ul> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pendapatan asli daerah</li> <li>-ukuran pemda</li> <li>kompleksitas pemerintahan</li> <li>-belanja daerah</li> <li>-rasio pembiayaan utang</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD, ukuran Pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.</li> <li>2. Tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan</li> </ol>

				-tingkat kesejahteraan masyarakat -kualitas laporan keuangan	informasi keuangan daerah.
6.	Diani (2016)	Analisis Determinan Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi pada Pulau Jawa)	Teori Agensi	Dependen: Pelaporan keuangan Pemda di Internet  Independen: -kompetisi politik -ukuran pemerintahan <i>-leverage</i> -kekayaan pemerintahan -tipe pemerintahan	1. Ukuran Pemda dan kekayaan Pemda berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan Pemda di Internet.  2. Kompetisi politik, <i>leverage</i> , dan tipe Pemda tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan keuangan Pemda di Internet.
7.	Medina (2012)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Teori Keagenan	Dependen : -ketersediaan IKD	<b>Metode logit:</b> 1. Ukuran pemerintah,ti

		<p>Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia</p>		<p>-aksesibilitas IKD</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ukuran pemda</li> <li>-kemandirian pemda</li> <li>-rasio pembiayaan utang</li> <li>- kompleksitas pemerintahan</li> <li>-pendapatan per kapita</li> </ul>	<p>ngkat independensi , dan kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan informasi keuangan dalam situs pemerintah daerah.</p> <p>2. Pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap tingkat ketersediaan IKD dalam situs pemerintah daerah.</p> <p><b>Metode regresi berganda:</b></p> <p>1. Ukuran pemda dan kompleksitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kesediaan IKD dalam situs pemerintah daerah.</p>
--	--	--	--	--	---

					2. <i>Leverage</i> dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap ketersediaan IKD pada situs pemerintah daerah.
--	--	--	--	--	---

Dari penelitian terdahulu yang telah diringkas didalam tabel diatas, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan lebih dari satu teori dalam penelitiannya. Dengan adanya beberapa teori dalam satu penelitian, menyebabkan pembahasan pada penelitian tersebut tidak terlalu jelas menjelaskan hubungan variabel dengan teori yang dipakai. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu teori sebagai kerangka teoritis yang mendasari riset ini. Selain itu, adanya perbedaan pendapat atas hasil penelitian di beberapa variabel yang sama maka peneliti mengkaji ulang variabel tersebut agar peneliti mendapatkan keyakinan atas perbedaan hasil tersebut.

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web

Masing-masing pemerintah daerah memiliki sumber daya yang beragam, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula sumber daya yang dimilikinya. Namun, adanya sumber daya yang beragam

menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, karena pemerintah harus memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan terbaik untuk publik yang diharapkan akan meningkatkan nilai transparansi pemerintah daerah tersebut. Dengan ukuran pemerintah daerah yang besar mengindikasikan jumlah kekayaan yang besar pula sehingga pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pengelolaan pemerintah akan semakin ketat karena terdapat kekhawatiran akan adanya penyelewengan dana yang mungkin saja bisa terjadi. Sejalan dengan teori agensi, pemerintah daerah sebisa mungkin mengurangi asimetri informasi keuangan tersebut terhadap masyarakat yang beranggapan tidak baik dengan cara mempublikasikan laporan keuangannya.

Di dalam penelitian Rahmawati (2016), menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki aset tinggi seharusnya lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan daerah untuk melakukan belanja daerah yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat terbuka dalam memberikan informasi pelaporan keuangan. Adanya publikasi laporan keuangan merupakan bentuk sinyal positif yang dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya publikasi laporan keuangan yang disajikan secara lengkap dapat menunjukkan adanya inisiatif dari pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam mengelola pemerintahannya. Pada umumnya, pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar cenderung memberikan kemudahan akses informasi keuangan pada situs resminya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Adiputra *et al*

(2018), Nufus *et al* (2019), Nosihana dan Yaya (2016) dan Medina (2012) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan tingkat transparansi pemerintah daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web*

### **2.3.2 Hubungan Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola administrasinya. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah gambaran akan kemampuan suatu daerah dalam menggali, memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dengan bijaksana untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, hingga untuk pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan teori agensi, jika suatu pemerintah daerah memiliki catatan kinerja keuangan yang buruk maka akan menghindari pengungkapan dan membatasi aksesibilitas informasi yang diperlukan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nufus *et al* (2019) yang meneliti hubungan antara kinerja keuangan pemerintah dapat

berpengaruh pada *Internet Financial Reporting*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik akan cenderung melakukan *Internet Financial Reporting*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara kinerja keuangan dengan tingkat transparansi pemerintah daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H2 : Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web*

### **2.3.3 Hubungan Opini Audit terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Setiap akhir periode akuntansi yakni satu tahun, pemerintah diwajibkan untuk meyerahkan laporan keuangan kepada auditor independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya BPK akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan masing-masing pemerintah daerah untuk mendapatkan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini audit merupakan laporan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 15 tahun 2004 bahwa opini yang dibuat BPK adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria Standar Akuntansi Pemerintah / Kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan peraturan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dari opini

audit yang dikeluarkan oleh BPK itulah yang menjadi alat pengukur kinerja suatu pemerintahan daerah apakah kualitas akuntabilitas keuangannya baik atau tidak. Menurut Trisnawati dan Achmad (2014), biasanya pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) akan cenderung untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Hal tersebut sejalan dengan teori agensi, dimana dilakukannya hal semacam itu bertujuan agar masyarakat sebagai prinsipal dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit yang baik dari BPK akan semakin terdorong untuk mengungkapkan informasi mengenai laporan keuangan tahun sebelumnya di situs resmi pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara opini audit dengan tingkat transparansi pemerintah daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H3 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web*

#### **2.3.4 Hubungan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Pasal 1 angka 12 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa rekomendasi merupakan saran oleh pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai dasar perbaikan bagi pengambil



keputusan suatu entitas. Tindak lanjut rekomendasi audit adalah salah satu upaya perbaikan kinerja pemerintah daerah khususnya pada bagian keuangan. Tindak lanjut rekomendasi audit juga suatu bentuk respon terhadap rekomendasi audit atas laporan keuangan. Adanya rekomendasi audit tersebut dapat membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga dapat ditransparansikan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh Sari (2013), yang menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan oleh BPK dapat berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintah daerah yang semakin baik. Berdasarkan pengertian teori agensi dimana semakin banyak rekomendasi audit yang ditindaklanjuti akan semakin menunjukkan bahwa kinerja dan tanggungjawab pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara tindak lanjut rekomendasi audit dengan tingkat transparansi pemerintah daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

*H4 : Tindak Lanjut Rekomendasi Audit berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web*

### **2.3.5 Hubungan Tingkat Kemakmuran Masyarakat terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Tingkat kemakmuran masyarakat suatu daerah dapat tercerminkan dari tingkat pendapatan perkapita pada masing-masing daerah. Pendapatan perkapita itu sendiri dapat mencerminkan perbandingan tingkat produktifitas tiap penduduk di suatu daerah, hal ini sejalan dengan teori agensi karena adanya pendapatan perkapita tinggi di suatu daerah merupakan amanah suatu pemerintahan daerah tersebut sebagai agen untuk mengelolanya untuk meningkatkan produktifitas penduduk sebagai prinsipal atau pihak pemberi amanah. Pada umumnya, banyaknya permintaan informasi terutama dari daerah yang tingkat kesejahteraannya tinggi dan umumnya tidak hanya terbatas pada informasi keuangan tetapi juga menginginkan informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan, terutama layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, akan diminta oleh masyarakat dengan kesejahteraan tinggi sehingga tekanan untuk mengungkapkan informasi ini lebih besar.

Tingkat kesejahteraan yang tinggi mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan pemerintahan, sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah maka akan semakin tinggi pula permintaan informasi yang ada pada situs resmi pemerintah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Purwanti (2016), Nor *et al* (2019), dan Medina (2012).

Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara sistem pengendalian intern dengan nilai transparansi pemerintah daerah dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

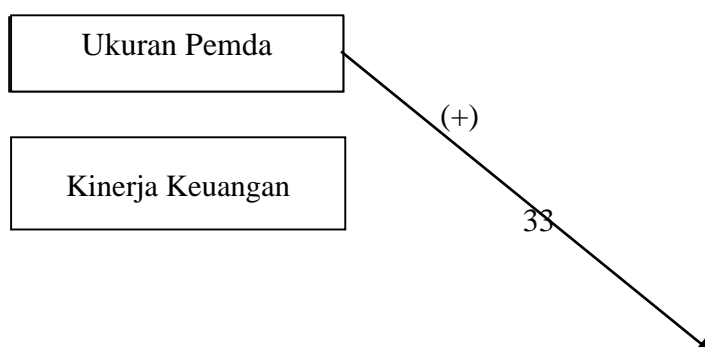
*H5 : Tingkat Kemakmuran Masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web*

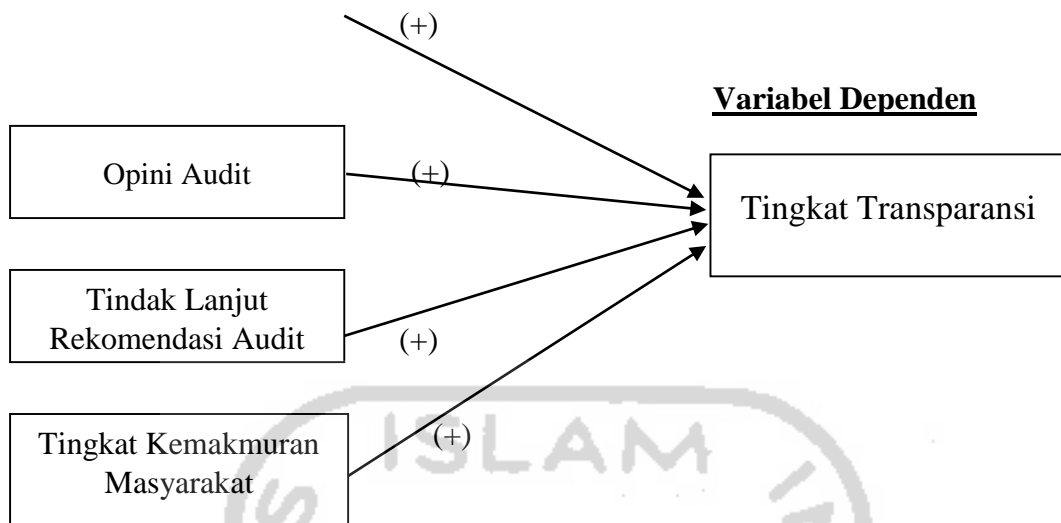
#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, telaah penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat aksesibilitas informasi keuangan yang diungkap pada situs resmi pemerintah daerah. Objek penelitian yang bersifat internal didalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, kinerja keuangan, opini audit dan tindak lanjut rekomendasi audit. Adapun objek penelitian yang bersifat eksternal atau dapat disebut faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi pembahasan yaitu tingkat kemakmuran masyarakat. Peneliti mengasumsikan objek penelitian tersebut pada masing-masing daerah diperkirakan memiliki pengaruh terhadap kemudahan dalam mengakses informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

#### Variabel Independen





## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel-variabel penelitian dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2011) berpendapat bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota 34 Provinsi di Indonesia atau sebanyak 514 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 (BPK, 2018).

Menurut Sugiyono (2011), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel akan dilakukan jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada didalam populasi. Untuk mempermudah proses penelitian ini, peneliti menargetkan untuk memilih 150 sampel dari keseluruhan populasi yang ada. Tetapi, karena pemerintah daerah yang terpilih menjadi sampel tidak semuanya memberikan pelaporan keuangannya di situs web maka jumlah sampel final yang di dapat adalah 64 pemerintah daerah (Kabupaten/Kota).

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan penulis adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau ketentuan tertentu, sehingga data yang didapat lebih

representatif dengan dilakukannya proses penelitian yang kompeten di bidangnya. Penulis telah menetapkan ketentuan tertentu dalam menentukan sampel yang di inginkan sebagai berikut:

1. LKPD tahun 2018 tersebar di Indonesia.
2. LKPD yang telah di audit oleh BPK.
3. LKPD tahun 2018 yang terdapat di situs resmi Pemda dan dapat diakses.
4. Data dari variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat diakses disitus resmi Pemda.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang telah melakukan penelitian dari sumber yang sudah ada (Hasan, 2002). Data sekunder ini dapat digunakan untuk mendukung informasi-informasi primer yang telah diperoleh. Data sekunder yang digunakan untuk mengukur variabel independen diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2018, data statistik BPS dan data yang diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan, untuk mengukur variabel dependen diperoleh dari masing-masing situs resmi pemerintah daerah.

### **3.3 Definisi Variabel Operasional Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009), variabel merupakan segala sesuatu yang dapat berbentuk apapun yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari hingga mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, lalu ditarik kesimpulannya. Penelitian ini terdiri

dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini yaitu tingkat transparansi pemerintah daerah, sedangkan variabel independen penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, belanja daerah, opinin audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan kemakmuran masyarakat.

### **3.3.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

#### **3.3.1.1 Aksesibilitas LKPD**

Penelitian ini menggunakan analisis logistik untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen yang diteliti yaitu aksesibilitas LKPD. Aksesibilitas yang dimaksud didalam penelitian ini adalah adanya kemudahan para pengguna dalam mencari maupun melihat informasi terkait laporan keuangan daerah yang disediakan pada laman resmi pemerintah daerah. Untuk menilai variable ini, penulis akan menggunakan indeks aksesibilitas atau *scoring* dengan mengadopsi penilaian yang digunakan dalam penelitian Adiputra *et al* (2018).

Pada penelitian ini, indeks aksesibilitas dihitung berdasarkan hasil penjumlahan dengan maksimal 4 poin dan minimal 1 poin untuk setiap daerah. Berikut langkah-langkah dalam menghitung indeks aksesibilitas:

1. 1 = jika laman pemerintah daerah dapat ditemukan di laman utama Google dengan mengetik nama pemerintah daerah yang dimaksud.
2. 1+ = jika data keuangan dan non keuangan dapat di unduh dengan berbagai format. Seperti dalam bentuk file pdf atau format HTML atau j.peg atau excel.
3. 1+ = jika terdapat informasi keuangan dan non-keuangan terdahulu di situs pemerintah daerah.
4. 1+ = jika pada tautan informasi keuangan dan non keuangan dapat diakses dengan 'klik' kurang dari 3 kali.

### **3.3.2 Variabel Independen**

Variabel independen menurut Sugiyono (2012), merupakan variabel yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit, dan tingkat kemakmuran masyarakat.

#### **3.3.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran Pemerintah Daerah adalah variabel untuk mengukur sumber daya ekonomi yang dimiliki dan diatur oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, variabel ini dapat digunakan sebagai proksi



akan tersedianya informasi pada situs resmi pemerintah (Medina, 2012). Pada penelitian ini, variabel ukuran pemerintah daerah akan dihitung menggunakan proksi dari besarnya total aset pemerintah daerah, seperti yang dilakukan pada penelitian Adiputra *et al* (2018), Diani (2016), dan Medina (2012).

$$\text{SIZE} = \text{Ln Total ASET}$$

Keterangan:

$\text{Ln}$  = Logaritma Natural

### 3.3.2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pada pemerintah daerah ditunjukkan dengan adanya laporan realisasi anggaran tahunan. Kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri menggambarkan tingkat kemandirian pemerintah daerah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Halim (2004) bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio keuangan pada pemerintah daerah yaitu berupa rasio kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian ini, variabel kinerja keuangan akan diukur menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya PAD pada suatu daerah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik (Medina, 2012). Pengukuran variabel kinerja keuangan pada penelitian ini akan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012).

$$KK = \frac{\text{TOTAL PAD}}{\text{TOTAL PENDAPATAN}}$$

### **3.3.2.3 Opini Audit**

Menurut Mulyadi (2014), opini audit adalah opini yang diberikan oleh auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan tempat auditor melakukan audit. Opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan yang disetorkan oleh seluruh pemerintah daerah menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah. Jenis-jenis opini audit menurut BPK yaitu ada 4 jenis opini. Adapun opini tersebut meliputi: (1) WTP (Wajar Tanpa Pengecualian); (2) WDP (Wajar Dengan Pengecualian); (3) Tidak Memberikan Pendapat; dan (4) Tidak Wajar. Pada penelitian ini, variabel opini audit akan diteleiti dengan menggunakan metode yang sama dengan penelitian Nosihana dan Yaya (2016), dimana opini audit tersebut akan diukur menggunakan variabel dummy. 1 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dan 0 untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit selain WTP.

### **3.3.2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit**

Tindak lanjut rekomendasi audit merupakan suatu kegiatan atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Hasil rekomendasi audit yang dikeluarkan oleh BPK harus dilakukan perbaikan oleh suatu entitas pemerintah yang diperiksa. Pengukuran variabel tindak lanjut rekomendasi audit pada penelitian ini, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nor *et al* (2019) sebagai berikut:

$$\text{PPTLHP} = \frac{\sum \text{rkm} - (\sum \text{btl} + \sum \text{bstl} + \sum \text{tdtl})}{\sum \text{rkm}} * 100\%$$

Keterangan:

PPTLHP = Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

$\sum \text{rkm}$  = jumlah rekomendasi

$\sum \text{btl}$  = jumlah belum di tindaklanjuti

$\sum \text{bstl}$  = jumlah tidak selesai ditindaklanjuti/tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi

$\sum \text{tdtl}$  = jumlah tidak ditindaklanjuti

### 3.3.2.5 Tingkat Kemakmuran Masyarakat

Tingkat kemakmuran masyarakat pada suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pendapatan perkapita masing-masing daerah itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Nor *et al* (2019) melakukan pengukuran tingkat kemakmuran masyarakat menggunakan Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian ini menggunakan pengukuran yang sama dengan penelitian Nor *et al* (2019) dengan membandingkan total Produk Domestik Regional Bruto dengan total populasi

$$\text{TKM} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Total Populasi Daerah}}$$

## 3.4 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini akan dianalisis menggunakan model regresi berganda. Namun, tidak hanya itu saja yang digunakan untuk menganalisis data. Data juga akan dianalisis menggunakan Statistik deskriptif dan Uji Asumsi Klasik. Dimana, Statistik Deskriptif bertujuan untuk mengetahui distribusi data dan Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Setelah diketahui bahwa model regresi layak, maka selanjutnya data dianalisis menggunakan uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikan parsial (Uji T), dan uji signifikan simultan (Uji F).

#### **3.4.1 Statistik Deskriptif**

Menurut Yamin dan Heri (2014) statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui ukuran pemusatan data (mean), ukuran penyebaran data (standar deviasi), dan distribusi data yaitu skewness dan kurtosis. Statistik deskriptif sendiri tidak digunakan untuk menguji hipotesis yang ada, melainkan digunakan untuk menampilkan dan menganalisis data yang disertai dengan perhitungan untuk memperjelas karakteristik data yang di analisis. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat transparansi pemerintah daerah sehingga pertanyaan penelitian pertama dapat terjawab.

#### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan yaitu Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinearitas.

### 3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012) uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik yaitu data distriibusi normal atau mendekati normal.

### 3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2012) menuturkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas dan jika varian residualnya tetap maka disebut homoskedastisitas.

### 3.4.2.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012) dilakukannya uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Ghozali (2012) menyatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Ada tidaknya multikolinearitas atas suatu model regresi dapat dilihat dari besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Untuk menunjukkan adanya multikolinearitas nilai *cutoff*

yang umum dipakai adalah nilai  $VIF \leq 10$  atau sama dengan nilai  $tolerance \geq 0,01$ .

### 3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji apakah variabel ukuran pemerintah daerah, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit, dan tingkat kemakmuran masyarakat mempengaruhi tingkat transparansi atau aksesibilitas LKPD pada situs resmi pemerintah daerah. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$TRANS = \alpha + \beta^1 SIZE + \beta^2 KK + \beta^3 AUDIT + \beta^4 REKOM + \beta^5 TKM + e$$

Keterangan:

TRANS = Tingkat Transparansi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

SIZE = Ukuran Pemda

KK = Kinerja keuangan

AUDIT = Opini audit

REKOM = Tindak lanjut rekomendasi audit

TKM = Tingkat kemakmuran masyarakat

$e$  = error

#### 3.4.4 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nosihana dan Yaya (2016) menyatakan bahwa uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Untuk nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Jika koefisiennya semakin mendekati 1 menandakan model penelitian semakin baik.

#### 3.4.5 Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Ghozali (2012) menuturkan bahwa uji signifikan parsial atau uji T digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar untuk pengambilan keputusan menggunakan uji T sebagai berikut:

1. Jika  $P \text{ value} < \alpha$  (0,05) maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika  $P \text{ value} > \alpha$  (0,05) maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 3.4.6 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan simultan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model; mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Menurut Ghozali (2012), dasar untuk pengambilan keputusan menggunakan uji signifikan simultan antara lain:

1. Jika nilai  $F > 4$  maka  $H_0$  ditolak pada derajat kepercayaan 5% atau dengan kata lain hipotesis *alternatif* diterima, yang berarti bahwa semua variabel independen secara bersamaan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Membandingkan nilai  $F$  hasil perhitungan dengan  $F$  tabel. Bila nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak.





## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai obyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 64 sampel yang mana sampel tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari masing-masing Kabupaten dan Kota di Indonesia. 64 sampel terdiri dari 16 Pemerintah Kota dan 48 Pemerintah Kabupaten. Target awal sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 150 data dari 514 populasi (Kabupaten/Kota) namun saat dilakukan nya *data collection* hanya terdapat 64 data. Yang artinya sebanyak 86 target data lainnya tidak menampilkan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resminya. Keenam puluh empat sampel ini dapat dilihat dari Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Data Kabupaten dan Kota**

No.	Kabupaten dan Kota
1.	Kota Banda Aceh
2.	Kota Lhokseumawe
3.	Kota Padang Panjang
4.	Kabupaten Bintan
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas
6.	Kota Pekanbaru

7.	Kabupaten Lebong
8.	Kabupaten Bengkulu Utara
9.	Kabupaten Lebak
10.	Kabupaten Bandung
11.	Kabupaten Karawang
12.	Kabupaten Kebumen
13.	Kabupaten Kudus
14.	Kabupaten Magelang
15.	Kabupaten Tegal
16.	Kota Magelang
17.	Kabupaten Kulonprogo
18.	Kabupaten Sleman
19.	Kabupaten Gunungkidul
20.	Kabupaten Banjarnegara
21.	Kabupaten Batang
22.	Kabupaten Blora
23.	Kabupaten Boyolali
24.	Kabupaten Cilacap
25.	Kabupaten Pekalongan
26.	Kabupaten Purbalingga
27.	Kabupaten Wonosobo
28.	Kabupaten Rembang

29.	Kabupaten Semarang
30.	Kabupaten Sragen
31.	Kota Surakarta
32.	Kota Tegal
33.	Kabupaten Bantul
34.	Kabupaten Banyuwangi
35.	Kabupaten Lamongan
36.	Kabupaten Lumajang
37.	Kabupaten Gresik
38.	Kabupaten Pacitan
39.	Kabupaten Pamekasan
40.	Kabupaten Ponorogo
41.	Kabupaten Blitar
42.	Kabupaten Situbondo
43.	Kota Surabaya
44.	Kabupaten Bojonegoro
45.	Kota Malang
46.	Kabupaten Tabanan
47.	Kota Denpasar
48.	Kota Mataram
49.	Kabupaten Lombok Tengah
50.	Kabupaten Karangasem

51.	Kabupaten Ngawi
52.	Kabupaten Sampang
53.	Kabupaten Trenggalek
54.	Kabupaten Tuban
55.	Kabupaten Kotawaringin Barat
56.	Kabupaten Pulang Pisau
57.	Kabupaten Kutai Timur
58.	Kota Balikpapan
59.	Kota Samarinda
60.	Kabupaten Bone
61.	Kabupaten Gowa
62.	Kota Palopo
63.	Kabupaten Jayawijaya
64.	Kabupaten Mamasa

#### 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menampilkan deskripsi atau gambaran pada suatu data. Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel dependen (tingkat transparansi) dan variabel independen (ukuran daerah, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat). Pada penelitian ini

analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

#### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen

Pada sub-bab ini, variabel dependen yaitu tingkat transparansi menggunakan metode *scoring* yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya dengan komponen penelitiannya (1 sampai 4). Hasil dari olah data mencakup nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Tingkat Transparansi**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
Tingkat Transparansi	64	2	4	3.61	0.523

Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai minimum pada variabel dependen ini memiliki nilai 2 yaitu setara dengan 50% tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia yaitu pada Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan nilai maksimum pada variabel ini memiliki nilai 4 atau setara dengan 100%. Nilai *Mean* pada variabel ini sebesar 3.61 yang artinya tingkat transparansi di Indonesia yang dilakukan oleh tiap-tiap pemda sudah cukup transparan.

#### 4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel independen diukur dalam bentuk variabel kategori dan variabel kontinu. Variabel kategori satu-satunya dalam penelitian ini yaitu hanya opini audit dan variabel kontinu yang ada adalah ukuran pemda, kinerja keuangan, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat. Variabel opini audit yang merupakan variabel kategori bersifat dikotomi yaitu dengan penilaian 1 untuk pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan 0 untuk pemerintah daerah yang memperoleh opini selain WTP. Hasil yang akan disajikan berupa nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen.

**Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Independen**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
Ukuran Pemda	64	Rp 1,222,738, 376,767.2 9	Rp 42,764,6 72,922,3 52.5	Rp 4,851,59 8,259,00 7.7	Rp 5,935,770,878,61 2.9
Kinerja Keuangan	64	0.032	0.61	0.1667	0.09749
Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	64	7.00	76.03	34.6314	13.91996
Tingkat Kemakmuran Masyarakat	64	14.11	19.77	17.2309	.90471

Sumber: IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020

Tabel 4.3 diatas menunjukkan hasil nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel independen dalam penelitian ini. Penjelasan untuk variabel-variabel tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemda diukur menggunakan total aset dari pemerintah daerah tersebut. Dilihat dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai minimum pada variabel ini sebesar Rp 1,2 Triliun yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran daerah paling besar yaitu Kota Surabaya dengan nilai maksimum Rp 42,8 Triliun. Rata-rata pada variabel ini sebesar Rp 4,9 Triliun yang berarti ukuran pemerintah daerah tidak terlalu besar.
2. Variabel Kinerja Keuangan, diukur dengan besarnya total PAD dibandingkan dengan total pendapatan memiliki rata-rata sebesar 0,1667 atau 16,67%. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan pemda dalam mengelola sumber daya yang dimiliki masih rendah. Nilai minimum pada variabel ini sebesar 0,032 yaitu pada Kabupaten Mamasa. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,61 yang dimiliki Kota Surabaya.
3. Tindak lanjut rekomendasi audit diukur dengan melihat prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada variabel ini rata-rata menunjukkan angka sebesar 34,63% yang artinya penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan belum banyak dilakukan perbaikan. Nilai minimum sebesar 7% yaitu pada Kabupaten Lebak. Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga memiliki nilai maksimum yaitu sebesar 76,03% yang artinya

Kabupaten Purbalingga hampir menyelesaikan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

4. Variabel Tingkat Kemakmuran Masyarakat diukur dengan besarnya PDRB dibandingkan dengan total penduduk atau populasi memiliki rata-rata sebesar 17,23 sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat tidak terlalu rendah. Nilai minimum menunjukkan sebesar 14,11 dan nilai maksimum sebesar 19,77.

**Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Untuk Data Kategorikal**

		Opini Audit			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	non-WTP	1	1,6	1,6	1,6
	WTP	63	98,4	98,4	100,0
	Total	64	100,0	100,0	

Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Pada Tabel 4.4 diketahui bahwa pada tahun 2018, 1 dari 64 sampel terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan opini selain WTP yaitu pada Kabupaten GunungKidul. 63 pemda lainnya atau sebesar 98,4% pemda di Indonesia yang terpilih menjadi sampel mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2018 dari sampel yang terpilih, pemda yang tidak mendapatkan opini WTP hanya sebesar 1,6%.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan antara lain uji



normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari uji asumsi klasik akan dijabarkan dibawah ini.

### 4.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas ini yaitu untuk menguji apakah variabel residual dalam penelitian ini terdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Menurut Ghozali (2018), variabel residual yang berdistribusi normal dilihat dari nilai signifikansi *Monte Carlo*. Uji normalitas akan terpenuhi atau dianggap lolos jika nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* di atas 0,05. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>			
		Unstandardized Residual	
N		64	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,51593714	
Most Extreme Differences	Absolute	,337	
	Positive	,192	
	Negative	-,337	
Test Statistic		,337	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,000 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000

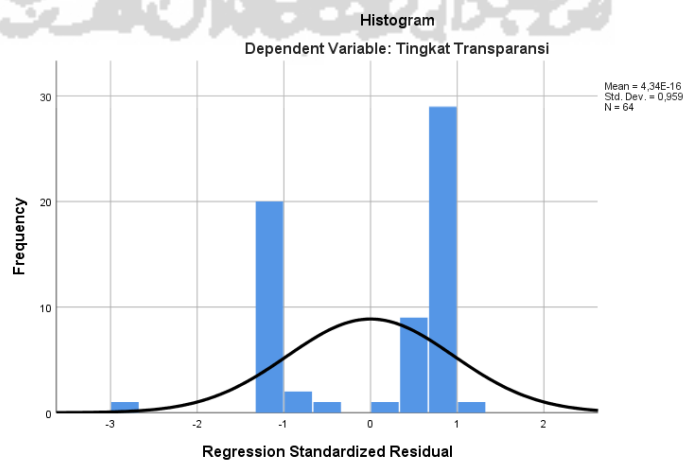
Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, hasil dari uji normalitas untuk *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* 64 sampel dapat diketahui bahwa nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 yang mana nilai nya kurang dari 0,05 atau 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terdistribusi normal.

#### 4.3.1.1 Uji Normalitas dengan Transformasi Data

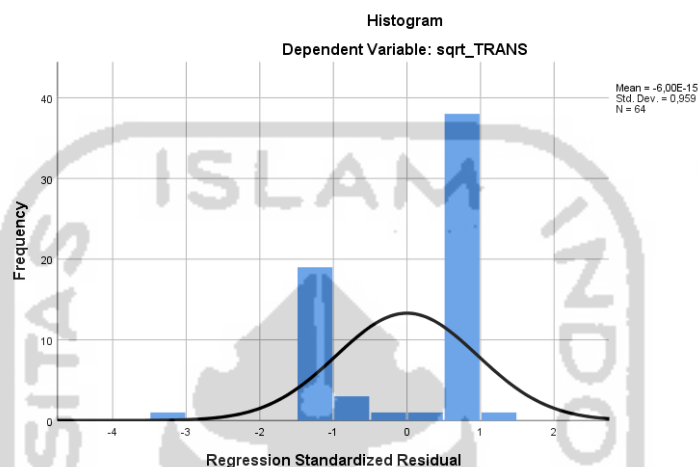
Pada pembahasan sebelumnya, telah disimpulkan bahwa untuk hasil uji normalitas data tidak berdistribusi normal. Dengan kesimpulan tersebut maka data untuk variabel yang bersifat kontinu perlu ditransformasikan dengan tujuan untuk menciptakan seri data yang baru agar memenuhi uji normalitas sebelum dilakukannya analisis regresi berganda. Sebelum dilakukannya transformasi data, penulis mengidentifikasi titik krisis pada data penelitian ini. Dapat dilihat pada Gambar 4.1 bahwa titik krisis data pada penelitian ini yaitu *Negative Skewness* atau titik krisis data lebih condong ke kanan maka datayang bersifat kontinu ditransformasikan dalam bentuk SQRT.

**Gambar 4.1 Histogram Sebelum Transformasi**



Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

**Gambar 4.2 Histogram Setelah Transformasi**



Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Hasil dari *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* setelah data di transformasi dalam fungsi SQRT seperti yang disajikan pada Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terdistribusi normal karena nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000.

**Tabel 4.6 Uji Normalitas Setelah Transformasi**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13984727
Most Extreme Differences	Absolute	,311
	Positive	,175
	Negative	-,311
Test Statistic		,311

Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 <sup>e</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,000 <sup>d</sup>
99% Confidence Interval		
	Lower Bound	,000
	Upper Bound	,000

Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

#### 4.3.1.2 Uji Normalitas dengan *Outliers*

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa uji normalitas dengan metode transformasi data tidak memenuhi nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)*. Oleh karena itu, agar data sampel memenuhi nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* maka pada penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan metode *outliers*. Menurut Santoso (2018), uji normalitas bertujuan untuk membuktikan nilai residu yang dihasilkan dari selisih antara Y aktual dan Y prediksi terdistribusi normal atau tidak. Rumus tersebut digunakan untuk mencari nilai error data. Rumus Y Prediksi:

$$\mathbf{Y \text{ Prediksi} = 6.824 - 0.041 * \text{SIZE} + 0.634 * \text{KK} - 0.334 * \text{AUDIT} - 0.002 * \text{REKOM} - 0.101 * \text{TKM}}$$

Angka pada rumus Y prediksi diatas diperoleh dari koefisien regresi berganda pada jumlah sampel data 64. Setelah diketahui nilai error data maka selanjutnya dilakukan eliminasi data dari data yang mempunyai nilai error tertinggi lalu di *input* ke dalam SPSS untuk di uji. Hal tersebut dilakukan berulang sampai mendapatkan nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05. Dengan metode ini data terdistribusi normal pada data ke 37 atau jumlah sampe menjadi 37 sampel.

Pada penelitian ini hanya terdapat 37 sampel dari sampel awal. Namun, sampel tersebut tetap dapat digunakan karena masih memenuhi jumlah minimum sampel untuk regresi berganda. Menurut Coakes and Steed (2010), jumlah sampel minimum yang memenuhi untuk uji regresi linier berganda adalah 5 dikali jumlah variabel independen. Sehingga sampel pada penelitian ini dapat digunakan untuk regresi berganda karena nilai minimum sampel untuk penelitian ini 25 sampel (5 x 5 variabel independen). Untuk lebih jelasnya, hasil uji normalitas menggunakan metode *outliers* dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Uji Normalitas Setelah *Outliers***

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Unstandardized Residual
	N		37
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.16585467
Most Extreme Differences	Absolute		.110
	Positive		.069
	Negative		-.110
	Kolmogorov-Smirnov Z		.668
	Asymp. Sig. (2-tailed)		.763
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.722 <sup>c</sup>
99% Confidence Interval	Lower Bound		.710
	Upper Bound		.733

Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Berdasarkan hasil penghitungan uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada Tabel 4.7 hasil yang diperoleh nilai *Monte*

*Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0.722 dimana nilai tersebut lebih besar dari 5% atau 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Dilakukannya uji multikolinearitas yaitu untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Dasar dalam pengambilan keputusan untuk uji multikolonieritas yaitu Nilai *tolerance* lebih dari **0.1** dan nilai VIF kurang dari **10**. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13.188	1.937		6.808	.000		
Ukuran Pemda	-.187	.065	-.445	2.901	.007	.493	2.027
Kinerja Keuangan	2.216	.495	.727	4.481	.000	.441	2.269
Opini Audit	.037	.183	.022	.200	.843	.982	1.019
Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	-.006	.002	-.294	2.691	.011	.968	1.033
Tingkat Kemakmuran Masyarakat	-.238	.037	-.770	6.446	.000	.813	1.231

Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Tabel 4.8 diatas menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas dimana kelima variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0.1 dan VIF

kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini model regresi bebas dari multikolonieritas yang artinya antara variabel-variabel independen tersebut tidak terdapat korelasi.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini menggunakan *Spearman's Rho Test*. Untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat digunakan uji *rank Spearman* dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (Gujarati, 2012). Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Dibawah ini merupakan tabel dari hasil uji heteroskedastisitas.

**Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas**

**Correlations**

			Ukura n Pemd a	Kinerja Keuanga n	Opini Audit	Tindak Lanjut Rekomenda si Audit	Tingkat Kemakmura n Masyarakat	ABS_RE S
Spearman' s rho	Ukuran Pemda	Correlatio n Coefficien t	1.000	.412*	.031	.138	.135	.266
		Sig. (2- tailed)	.	.011	.854	.415	.425	.111
		N	37	37	37	37	37	37
Kinerja Keuangan	Kinerja Keuangan	Correlatio n Coefficien t	.412*	1.000	.078	.126	.526**	.049
		Sig. (2- tailed)	.011	.	.646	.458	.001	.772
		N	37	37	37	37	37	37
Opini Audit	Opini Audit	Correlatio n Coefficien t	.031	.078	1.00 0	.125	.125	.281
		Sig. (2- tailed)	.854	.646	.	.461	.461	.092
		N	37	37	37	37	37	37
Tindak Lanjut Rekomenda si Audit	Tindak Lanjut Rekomenda si Audit	Correlatio n Coefficien t	.138	.126	.125	1.000	-.128	.260
		Sig. (2- tailed)	.415	.458	.461	.	.449	.120
		N	37	37	37	37	37	37



Tingkat Kemakmuran Masyarakat	Correlation Coefficient	.135	.526**	.125	-.128	1.000	.241
	Sig. (2-tailed)	.425	.001	.461	.449	.	.151
	N	37	37	37	37	37	37
ABS_RES	Correlation Coefficient	.266	.049	.281	.260	.241	1.000
	Sig. (2-tailed)	.111	.772	.092	.120	.151	.
	N	37	37	37	37	37	37

Sumber: IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020

Dari Tabel 4.9 diatas, kelima variabel independen memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

#### 4.4 Analisis Regresi Berganda

Perhitungan model regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS, analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.10 Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	P-value
(Constant)	13,188	0,000
Ukuran Pemda	-0,187	0,007
Kinerja Keuangan	2,216	0,000
Opini Audit	0,037	0,843
Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	-0,006	0,011
Tingkat Kemakmuran Masyarakat	-0,238	0,000
Model Summary		
Adjusted R square		0,583
Regression Model		,000 <sup>b</sup>

Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Berdasarkan tabel 4.10 Hasil uji regresi berganda diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{TRANS} = 13.188 - 0.187\text{SIZE} + 2.216\text{KK} + 0.037\text{AUDIT} - 0.006\text{REKOM} - 0.238\text{TKM}$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama memprediksi adanya hubungan positif antara ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat transparansi. Berdasarkan Tabel 4.7 *p-value* untuk variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 0,007 dengan nilai koefisiensi -0,187 yang berarah negatif. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan tidak terdukung.

2. Hipotesis kedua memprediksi adanya hubungan positif antara kinerja keuangan terhadap tingkat transparansi. Berdasarkan Tabel 4.7 *p-value* untuk variabel kinerja keuangan sebesar 0,000 dengan nilai koefisiensi 2,216. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara kinerja keuangan dengan tingkat transparansi. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan terdukung.
3. Hipotesis ketiga memprediksi adanya hubungan positif antara opini audit terhadap tingkat transparansi. Berdasarkan Tabel 4.7 *p-value* untuk variabel opini audit sebesar 0,843 dimana nilai signifikansi nya lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan ditolak.
4. Hipotesis keempat memprediksi adanya hubungan positif antara tindak lanjut rekomendasi audit terhadap tingkat transparansi. Berdasarkan Tabel 4.7 *p-value* untuk variabel tindak lanjut rekomendasi audit sebesar 0,011 dengan nilai koefisiensi -0,006 dengan arah yang negatif. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan tidak terdukung.
5. Hipotesis kelima memprediksi adanya hubungan positif antara tingkat kemakmuran masyarakat terhadap tingkat transparansi. Berdasarkan Tabel 4.7 *p-value* untuk variabel tingkat kemakmuran masyarakat sebesar 0,000 dengan nilai koefisiensi -0,238 dengan arah yang negatif. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang diajukan tidak terdukung.

#### **4.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model yang ada dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil dari uji  $R^2$  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 <sup>a</sup>	.641	.583	.179

Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Dari hasil uji koefisien determinasi diatas, diperoleh nilai ajusted  $R^2$  sebesar 0,583 atau sebesar 58,3% yang artinya bahwa tingkat transparansi pemerintah daerah di Indonesia dapat dijelaskan sebesar 58,3% oleh variabel-variabel independen yaitu ukuran pemda, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit serta tingkat kemakmuran masyarakat. Sedangkan 41,7% variasi tingkat transparansi pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel lainnya diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **4.6 Uji Signifikan Simultan (Uji F)**

Uji signifikansi simultan atau Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdapat dalam suatu model mempunyai pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dan F-tabel.

**Tabel 4.12 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.766	5	.353	11.060	.000 <sup>a</sup>
Residual	.990	31	.032		
Total	2.757	36			

Sumber: *IBM Statistical SPSS 16 Output, 2020*

Berdasarkan tabel hasil uji F diatas dapat diketahui bahwa F-hitung memiliki nilai sebesar 11,060 yakni lebih besar daripada F-tabel yang sebesar 2,52 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran pemda, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat transparansi.

#### **4.7 Pembahasan**

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat 5 hipotesis yang diajukan. Untuk ringkasan hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	Hipotesis	Deskripsi	Keterangan
Ukuran Pemda (X1)	H1	Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan	Ditolak

		pemerintah daerah di situs web	
Kinerja Keuangan (X2)	H2	Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web	Diterima
Opini Audit (X3)	H3	Opini Audit berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web	Ditolak
Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X4)	H4	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web	Ditolak

Tingkat Kemakmuran Masyarakat (X5)	H5	Tingkat Kemakmuran Masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelapora pemerintah daerah di situs web	Ditolak
------------------------------------	----	---	---------

Seperti pada Tabel 4.13 diatas dapat ditemukan bahwa terdapat 4 hipotesis yang tidak berpengaruh positif diantaranya yaitu ukuran pemda, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat yang tidak mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat transparansi di Indonesia. Sedangkan, terdapat satu hipotesis yang berpengaruh positif yaitu pada hipotesis ke dua (H2). Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hasil uji hipotesis sebagai berikut:

**1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa ukuran suatu pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran daerah (total aset) yang dimiliki suatu daerah maka pemerintah daerah setempat semakin tidak terdorong atau termotivasi untuk

melakukan transparansi terhadap laporan keuangan dan non keuangannya. Tetapi, pada daerah yang memiliki total aset yang kecil juga bukan berarti pemerintah serta merta dalam memiliki kesadaran untuk meningkatkan transparansinya namun masyarakat memiliki peran sebagai *watchdog* terhadap pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diani (2016), Nufus *et al* (2019) dan Medina (2012), yang mana ukuran pemda berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi.

## **2. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan pada suatu daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web. Hal yang mungkin terjadi adalah jika suatu pemerintah daerah yang dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik akan cenderung untuk melakukan transparansi keuangannya pada situs resmi yang dimilikinya. Jika kinerja keuangan pemerintah daerah baik maka akan menghasilkan citra yang positif kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah itu sendiri tidak ragu untuk melakukan transparansi. Hiola *et al* (2015) juga mengatakan bahwa jika kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik maka pemerintah daerah tersebut akan semakin patuh dalam melaksanakan pengungkapan informasi keuangan dalam situs resminya.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nufus *et al* (2019) bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi. Nufus *et al* (2019) juga menyatakan bahwa pada pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan yang tinggi (baik) akan melakukan *Internet Financial Reporting*.

### **3. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web. Hal yang mungkin terjadi mengapa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi adalah bahwa pemerintah daerah yang mendapat opini selain WTP tidak selalu mengindikasikan akuntabilitas dan kinerja pada pemerintah daerah tersebut buruk, selain itu pemerintah daerah yang mendapat opini WTP juga tidak mengindikasikan pemerintah daerah itu selalu baik karena kinerja dan akuntabilitas suatu pemerintah daerah tidak hanya diukur melalui hasil laporan keuangannya saja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nosihana dan Yaya (2016) bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi.

### **4. Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak memiliki pengaruh positif terhadap transparansi pelaporan pemerintah daerah di situs web. Penjelasan yang mungkin untuk hasil ini adalah bahwa setiap pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perbaikan pada laporan keuangan atas dasar hasil rekomendasi audit yang diberikan oleh BPK pada masing-masing pemda. Selain dibutuhkan komitmen untuk memperbaiki kesalahan maka pemerintah daerah juga perlu konsisten dalam melakukan perbaikan agar nantinya kesalahan yang sudah terjadi diharapkan tidak terulang lagi pada tahun anggaran selanjutnya. Komitmen yang dimiliki pemerintah daerah merupakan kewajiban agar kinerja pada laporan keuangan menjadi lebih baik. Tanggapan terhadap perbaikan tersebut merupakan suatu manifestasi dari tanggung jawab suatu pemerintah daerah untuk merealisasikan transparansi laporan keuangan kepada masyarakat.

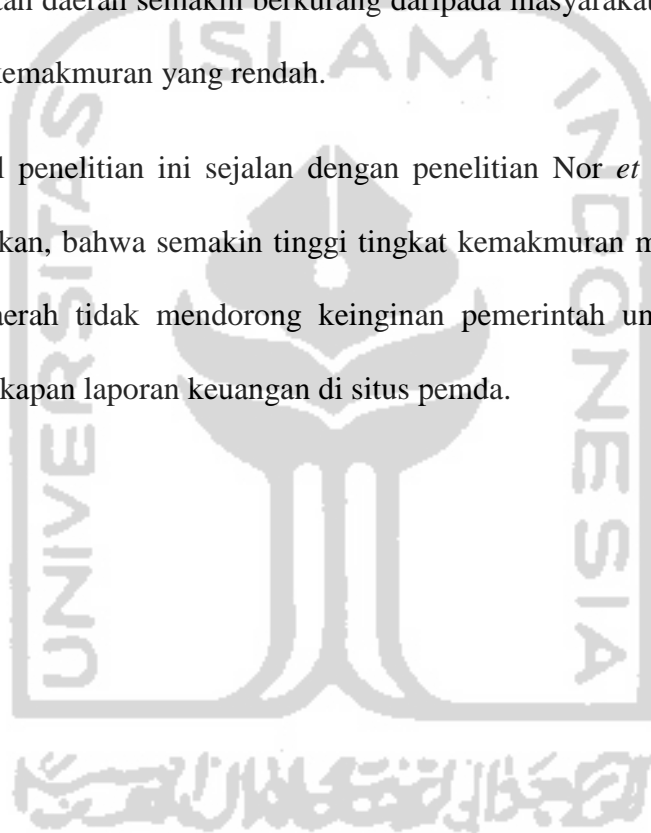
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nor *et al* (2019). Nor *et al* (2019), menyatakan bahwa hasil rekomendasi audit tidak mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pengungkapan informasi keuangan di situs pemerintah daerah.

##### **5. Pengaruh Tingkat Kemakmuran Masyarakat terhadap Tingkat Transparansi Pelaporan Pemerintah Daerah di Situs Web**

Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat tidak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat transparansi

pelaporan pemerintah daerah di situs web. Hal yang mungkin terjadi adalah pada tingkat kemakmuran yang tinggi, pengungkapan informasi keuangan bukan lagi menjadi kebutuhan untuk masyarakat tersebut. Sehingga, semakin tinggi kemakmuran masyarakat pada suatu daerah maka sifat pemantauan dari masyarakat terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah semakin berkurang daripada masyarakat yang memiliki tingkat kemakmuran yang rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nor *et al* (2019) yang menyatakan, bahwa semakin tinggi tingkat kemakmuran masyarakat pada suatu daerah tidak mendorong keinginan pemerintah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan di situs pemda.



## BAB V

### SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi pengungkapan informasi di situs web pemerintah daerah di Indonesia dan mendapatkan bukti terkait determinan yang ada, seperti ukuran pemerintah daerah, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat apakah memiliki pengaruh pada tingkat transparansi pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi pada situs web pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia sudah cukup transparan. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa determinan kinerja keuangan ternyata berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori keagenan hanya mampu menjelaskan secara parsial fenomena transparansi situs web pemerintah daerah di Indonesia.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut yaitu:

1. Jumlah sampel yang digunakan untuk uji hipotesis setelah dilakukan deteksi *outliers* hanya 37 sampel.

2. Komponen penilaian pada pengukuran variabel dependen kurang beragam sehingga kemungkinan mempengaruhi pada saat proses pengolahan data.

### **5.3 Saran**

Dengan mempertimbangkan simpulan dan keterbatasan pada penelitian ini maka peneliti akan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan Tingkat Transparansi. Hal-hal yang peneliti sarankan, sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel-variabel yang relevan dengan Tingkat Transparansi. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran seperti belanja daerah.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang digunakan agar lebih merepresentasikan populasi.
3. Peneliti selanjutnya perlu menambah indikator penilaian transparansi dalam pengukuran variabel transparansi.

### **5.4 Implikasi**

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat diimpilasikan guna memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar memberikan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat melalui situs resmi yang dimiliki. Selain itu, agar pemerintah daerah semakin mengembangkan situs resminya agar informasi keuangan dan non keuangan lebih mudah untuk diakses.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I.M.P., Utama, S. dan Rossieta, H. (2018), "Transparency of local government in Indonesia", *Asian Journal of Accounting Research* Vol. 3 No. 1, 2018 pp. 123-138.
- Chadwick, A., & May, C. (2003). Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: E-Government in the Unites States, Britain, and the European Union. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, vol. 16 (2), page: 271-300.
- Coakes, S., & L. Steed. (2010). *SPSS: Analysis without anguish: Version 17 for Windows*. Milton: John Wiley & Sons Australia.
- Diani, R. P. (2016). Analisis Determinan Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah daerah di Indonesia.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS20. 6th ed.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). *Accounting Theory 7th Edition*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd
- Gujarati, D.N. (2012). Dasar-dasar Ekonometrika. Edisi 5. Jakarata: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat: Jakarta.

- Hartono, J. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, M.Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia. Indonesia.
- Hiola, Y., Rosidi, & Mulawarman, A. D. (2015). Political Environment in the Effect of the Regional Government Financial Performance on Disclosure of Financial Information on Website. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 19(1), 27–36.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., & Warfield, T.D. (2007). *Accounting Principles 12<sup>th</sup> Edition*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Medina, F. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Moon, J. (2002). The Evolution of E-government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?. *Public Administration Review*, 62 (4), 424-433.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Nainggolan, A.T., dan Purwanti, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung.
- Nor, W., Muhammad, H. dan Rifqi, N. (2019), “Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s)”, *Asian Journal of Accounting Research* Vol. 4 No. 1, 2019 pp. 112-128.

- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104.
- Nufus, S., Herwanti, T., dan Budi, S. (2016). Pengaruh Ukuran Pemda, *Leverage* dan Kinerja Keuangan terhadap IFR pada Pemda dengan Dimoderasi Opini Audit. *E-Jurnal Akuntansi Vol.29 No.3*, 2019 hal. 1012-1025
- Nurillah. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.1 No.1, 2014 hal. 2337-3806.
- Rahmawati, Ria Aini. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Accounting Analysis Journal* Vol. 5, No. 2, 2016 pp. 122-130.
- Republik Indonesia (2003), Undang-Undang Nomor 17, Tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia (2003), Instruksi Presiden Nomor 3, Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.
- Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Nomor 15, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Nomor 32, Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia (2005b), Peraturan Pemerintah Nomor 56, Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia (2007), Peraturan Pemerintah Nomor 3, Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan



Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Republik Indonesia (2008), Undang-Undang Nomor 14, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Republik Indonesia (2010), Peraturan Pemerintah Nomor 71, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia (2012), Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188-52/1797/SJ, Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Rora, Puspita Sari. (2010). Pengaruh Kinerja, Tingkat Ketergantungan dan Karakteristik Pemda Tahun 2010. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

Santoso, Agung Budi. (2018). Tutorial dan Solusi Pengolahan Data Regresi. E-Book: Nulis Buku.

Sari, Ni Putu I. P., dan Sudana, I Putu. (2013). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor pada Kualitas Proses Audit. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.1 : 136-158. ISSN : 2302-8556.

Scott, William, R. (1997). *Financial Accounting Theory*. International Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Setyaningrum, D. (2015), Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Disertasi FEB UI, Depok.

Styles, Alan K., Mack Tennyson. (2007). The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19 (1), 56-92.

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Pramudiarta, R. (2015), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah, Skripsi FEB UNDIP, Semarang.
- Yamin, S., & Heri, K. (2014). SPSS Complete: Teknik Analisis Terlengkap dengan Software SPSS. Jakarta: Salemba Infotek

## LAMPIRAN 1

### SAMPEL FINAL

No.	Kabupaten dan Kota
1.	Kota Padang Panjang
2.	Kabupaten Kepulauan Anambas
3.	Kabupaten Bengkulu Utara
4.	Kabupaten Lebak
5.	Kabupaten Kudus
6.	Kabupaten Magelang
7.	Kabupaten Tegal
8.	Kota Magelang
9.	Kabupaten Kulonprogo
10.	Kabupaten Gunungkidul
11.	Kabupaten Banjarnegara
12.	Kabupaten Blora
13.	Kabupaten Pekalongan
14.	Kabupaten Purbalingga
15.	Kabupaten Wonosobo
16.	Kabupaten Semarang
17.	Kabupaten Bantul
18.	Kabupaten Banyuwangi

19.	Kabupaten Lamongan
20.	Kabupaten Lumajang
21.	Kabupaten Pacitan
22.	Kabupaten Situbondo
23.	Kota Surabaya
24.	Kota Malang
25.	Kabupaten Tabanan
26.	Kabupaten Lombok Tengah
27.	Kabupaten Karangasem
28.	Kabupaten Ngawi
29.	Kabupaten Sampang
30.	Kabupaten Trenggalek
31.	Kabupaten Tuban
32.	Kabupaten Kotawaringin Barat
33.	Kota Samarinda
34.	Kabupaten Bone
35.	Kabupaten Pekalongan
36.	Kota Palopo
37.	Kabupaten Jayawijaya

## LAMPIRAN 2

### TABULASI VARIABEL INDEPEDEN

#### A. Ukuran Pemnda

Kabupaten dan Kota	Ukuran daerah
Kota Banda Aceh	29,35651775
Kota Lhokseumawe	28,06117479
Kota Padang Panjang	27,83211403
Kabupaten Bintan	28,53776691
Kabupaten Kepulauan Anambas	28,07554175
Kota Pekanbaru	29,51369431
Kabupaten Lebong	28,07668033
Kabupaten Bengkulu Utara	28,1080754
Kabupaten Lebak	29,05191058
Kabupaten Bandung	29,05675767
Kabupaten Karawang	29,20953061
Kabupaten Kebumen	29,14586002
Kabupaten Kudus	29,0564609
Kabupaten Magelang	28,77580452
Kabupaten Tegal	28,78921921
Kota Magelang	28,98308657
Kabupaten Kulonprogo	28,36857496
Kabupaten Sleman	29,14348216
Kabupaten Gunungkidul	28,67705708
Kabupaten Banjarnegara	29,10046892
Kabupaten Batang	28,54779785
Kabupaten Blora	28,7024189
Kabupaten Boyolali	28,76760044
Kabupaten Cilacap	29,15500446
Kabupaten Pekalongan	28,64751259
Kabupaten Purbalingga	28,59492637
Kabupaten Wonosobo	28,75271736
Kabupaten Rembang	28,36501041
Kabupaten Semarang	29,10835621

Kabupaten Sragen	28,84599183
Kota Surakarta	29,67659158
Kota Tegal	28,50773091
Kabupaten Bantul	28,81121957
Kabupaten Banyuwangi	29,05520849
Kabupaten Lamongan	29,2521605
Kabupaten Lumajang	28,50036912
Kabupaten Gresik	29,41099043
Kabupaten Pacitan	28,33922047
Kabupaten Pamekasan	28,8790893
Kabupaten Ponorogo	28,67501069
Kabupaten Blitar	29,02711596
Kabupaten Situbondo	29,49661727
Kota Surabaya	31,38673348
Kabupaten Bojonegoro	29,74929203
Kota Malang	29,48678215
Kabupaten Tabanan	28,42800526
Kota Denpasar	30,69936242
Kota Mataram	28,76617343
Kabupaten Lombok Tengah	28,66358795
Kabupaten Karangasem	28,02526047
Kabupaten Ngawi	28,8414466
Kabupaten Sampang	28,84818935
Kabupaten Trenggalek	28,4841306
Kabupaten Tuban	29,62126399
Kabupaten Kotawaringin Barat	28,61822387
Kabupaten Pulang Pisau	28,33287684
Kabupaten Kutai Timur	29,86838477
Kota Balikpapan	30,03568982
Kota Samarinda	30,54468676
Kabupaten Bone	28,63279108
Kabupaten Gowa	28,95543693
Kota Palopo	28,37749763
Kabupaten Jayawijaya	28,64824966
Kabupaten Mamasa	27,93468966

## B. Kinerja Keuangan

Kabupaten dan Kota	Kinerja Keuangan
Kota Banda Aceh	0,216805164

Kota Lhokseumawe	0,087561343
Kota Padang Panjang	0,144012243
Kabupaten Bintan	0,253982699
Kabupaten Kepulauan Anambas	0,041993299
Kota Pekanbaru	0,265191166
Kabupaten Lebong	0,053078704
Kabupaten Bengkulu Utara	0,102992556
Kabupaten Lebak	0,139498044
Kabupaten Bandung	0,185489878
Kabupaten Karawang	0,279241975
Kabupaten Kebumen	0,133360524
Kabupaten Kudus	0,168975469
Kabupaten Magelang	0,141208595
Kabupaten Tegal	0,147475718
Kota Magelang	0,275168283
Kabupaten Kulonprogo	0,142296808
Kabupaten Sleman	0,329650145
Kabupaten Gunungkidul	0,122635012
Kabupaten Banjarnegara	0,113751272
Kabupaten Batang	0,139579965
Kabupaten Blora	0,095810596
Kabupaten Boyolali	0,153945679
Kabupaten Cilacap	0,171731259
Kabupaten Pekalongan	0,148130218
Kabupaten Purbalingga	0,145079512
Kabupaten Wonosobo	0,122509697
Kabupaten Rembang	0,166120497
Kabupaten Semarang	0,181105449
Kabupaten Sragen	0,15381932

Kota Surakarta	0,280853462
Kota Tegal	0,278574884
Kabupaten Bantul	0,207677493
Kabupaten Banyuwangi	0,150140226
Kabupaten Lamongan	0,155313222
Kabupaten Lumajang	0,130052176
Kabupaten Gresik	0,332802964
Kabupaten Pacitan	0,103524681
Kabupaten Pamekasan	0,120803073
Kabupaten Ponorogo	0,125641633
Kabupaten Blitar	0,107329625
Kabupaten Situbondo	0,106680664
Kota Surabaya	0,608288389
Kabupaten Bojonegoro	0,088140507
Kota Malang	0,272958511
Kabupaten Tabanan	0,206838057
Kota Denpasar	0,443230741
Kota Mataram	0,252973426
Kabupaten Lombok Tengah	0,094766688
Kabupaten Karangasem	0,135110376
Kabupaten Ngawi	0,11828909
Kabupaten Sampang	0,079726104
Kabupaten Trenggalek	0,128159373
Kabupaten Tuban	0,165880966
Kabupaten Kotawaringin Barat	0,139211805
Kabupaten Pulang Pisau	0,04126753
Kabupaten Kutai Timur	0,045770802
Kota Balikpapan	0,289979732
Kota Samarinda	0,184752623



Kabupaten Bone	0,09515951
Kabupaten Gowa	0,121877777
Kota Palopo	0,144366877
Kabupaten Jayawijaya	0,058834985
Kabupaten Mamasa	0,032088688

### C. Opini Audit

Kabupaten dan Kota	Opini Audit
Kota Banda Aceh	1
Kota Lhokseumawe	1
Kota Padang Panjang	1
Kabupaten Bintan	1
Kabupaten Kepulauan Anambas	1
Kota Pekanbaru	1
Kabupaten Lebong	1
Kabupaten Bengkulu Utara	1
Kabupaten Lebak	1
Kabupaten Bandung	1
Kabupaten Karawang	1
Kabupaten Kebumen	1
Kabupaten Kudus	1
Kabupaten Magelang	1
Kabupaten Tegal	1
Kota Magelang	1
Kabupaten Kulonprogo	1
Kabupaten Sleman	1
Kabupaten Gunungkidul	0
Kabupaten Banjarnegara	1
Kabupaten Batang	1

Kabupaten Blora	1
Kabupaten Boyolali	1
Kabupaten Cilacap	1
Kabupaten Pekalongan	1
Kabupaten Purbalingga	1
Kabupaten Wonosobo	1
Kabupaten Rembang	1
Kabupaten Semarang	1
Kabupaten Sragen	1
Kota Surakarta	1
Kota Tegal	1
Kabupaten Bantul	1
Kabupaten Banyuwangi	1
Kabupaten Lamongan	1
Kabupaten Lumajang	1
Kabupaten Gresik	1
Kabupaten Pacitan	1
Kabupaten Pamekasan	1
Kabupaten Ponorogo	1
Kabupaten Blitar	1
Kabupaten Situbondo	1
Kota Surabaya	1
Kabupaten Bojonegoro	1
Kota Malang	1
Kabupaten Tabanan	1
Kota Denpasar	1
Kota Mataram	1
Kabupaten Lombok Tengah	1
Kabupaten Karangasem	1

Kabupaten Ngawi	1
Kabupaten Sampang	1
Kabupaten Trenggalek	1
Kabupaten Tuban	1
Kabupaten Kotawaringin Barat	1
Kabupaten Pulang Pisau	1
Kabupaten Kutai Timur	1
Kota Balikpapan	1
Kota Samarinda	1
Kabupaten Bone	1
Kabupaten Gowa	1
Kota Palopo	1
Kabupaten Jayawijaya	1
Kabupaten Mamasa	1

#### D. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Kabupaten dan Kota	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit
Kota Banda Aceh	28,27586207
Kota Lhokseumawe	14,86666667
Kota Padang Panjang	25
Kabupaten Bintan	29,16666667
Kabupaten Kepulauan Anambas	24,36
Kota Pekanbaru	36,18918919
Kabupaten Lebong	39,45
Kabupaten Bengkulu Utara	51,11538462
Kabupaten Lebak	7
Kabupaten Bandung	58,28813559
Kabupaten Karawang	49,38

Kabupaten Kebumen	45,54347826
Kabupaten Kudus	70,66197183
Kabupaten Magelang	53,24074074
Kabupaten Tegal	38,46153846
Kota Magelang	28,68965517
Kabupaten Kulonprogo	25,76923077
Kabupaten Sleman	37
Kabupaten Gunungkidul	24,4
Kabupaten Banjarnegara	56,42105263
Kabupaten Batang	50,2745098
Kabupaten Blora	21,63636364
Kabupaten Boyolali	46,74468085
Kabupaten Cilacap	45,80434783
Kabupaten Pekalongan	36,40540541
Kabupaten Purbalingga	76,02597403
Kabupaten Wonosobo	41,26190476
Kabupaten Rembang	37,02631579
Kabupaten Semarang	43,29545455
Kabupaten Sragen	39,525
Kota Surakarta	68,63768116
Kota Tegal	42,09302326
Kabupaten Bantul	26,03703704
Kabupaten Banyuwangi	43,06818182
Kabupaten Lamongan	19,35
Kabupaten Lumajang	18,15789474
Kabupaten Gresik	32,09090909
Kabupaten Pacitan	20,52380952
Kabupaten Pamekasan	34,17142857
Kabupaten Ponorogo	26,40740741

Kabupaten Blitar	40,43902439
Kabupaten Situbondo	20,47619048
Kota Surabaya	40,12195122
Kabupaten Bojonegoro	19
Kota Malang	29,2
Kabupaten Tabanan	30,4516129
Kota Denpasar	18,31578947
Kota Mataram	29,63333333
Kabupaten Lombok Tengah	44,55555556
Kabupaten Karangasem	27,39285714
Kabupaten Ngawi	21,72727273
Kabupaten Sampang	27,07142857
Kabupaten Trenggalek	32,54545455
Kabupaten Tuban	22,56521739
Kabupaten Kotawaringin Barat	14,73333333
Kabupaten Pulang Pisau	23,375
Kabupaten Kutai Timur	26,48148148
Kota Balikpapan	19
Kota Samarinda	46,14893617
Kabupaten Bone	35,80555556
Kabupaten Gowa	40,19512195
Kota Palopo	26,40740741
Kabupaten Jayawijaya	41,88095238
Kabupaten Mamasa	27,07142857

#### E. Tingkat Kemakmuran Masyarakat

Kabupaten dan Kota	Tk. Kemakmuran masyarakat
Kota Banda Aceh	73576088,5

Kota Lhokseumawe	44349085,11
Kota Padang Panjang	61570045,58
Kabupaten Bintan	131475149,4
Kabupaten Kepulauan Anambas	386418365,7
Kota Pekanbaru	122812916,8
Kabupaten Lebong	17804832,99
Kabupaten Bengkulu Utara	17763579,65
Kabupaten Lebak	16201980,27
Kabupaten Bandung	32129965,33
Kabupaten Karawang	75427060,06
Kabupaten Kebumen	13778839,86
Kabupaten Kudus	125545076,7
Kabupaten Magelang	17236950,09
Kabupaten Tegal	22906720,85
Kota Magelang	47531766,47
Kabupaten Kulonprogo	17345255,86
Kabupaten Sleman	31179053,52
Kabupaten Gunungkidul	17083853,08
Kabupaten Banjarnegara	14403460,5
Kabupaten Batang	18688772,25
Kabupaten Blora	19697071,39
Kabupaten Boyolali	21628125,96
Kabupaten Cilacap	53337672,51
Kabupaten Pekalongan	16605539,03
Kabupaten Purbalingga	17265216,55
Kabupaten Wonosobo	15167668,1
Kabupaten Rembang	20535439,01
Kabupaten Semarang	33567773,03
Kabupaten Sragen	25835119,87

Kota Surakarta	59590694,13
Kota Tegal	37726916,78
Kabupaten Bantul	19488788,39
Kabupaten Banyuwangi	30922338,41
Kabupaten Lamongan	19369982,13
Kabupaten Lumajang	19470064,8
Kabupaten Gresik	76912875,85
Kabupaten Pacitan	25779914,99
Kabupaten Pamekasan	22560487,1
Kabupaten Ponorogo	23298710,6
Kabupaten Blitar	19921384,11
Kabupaten Situbondo	27785932,36
Kota Surabaya	136968809,3
Kabupaten Bojonegoro	50113342,09
Kota Malang	81403639,11
Kabupaten Tabanan	32037064,42
Kota Denpasar	80559331,48
Kota Mataram	31193832,75
Kabupaten Lombok Tengah	11511027,62
Kabupaten Karangasem	19354992,49
Kabupaten Ngawi	14518146,29
Kabupaten Sampang	16325549,91
Kabupaten Trenggalek	16510346,46
Kabupaten Tuban	36270806,11
Kabupaten Kotawaringin Barat	49862459,68
Kabupaten Pulang Pisau	25249048,51
Kabupaten Kutai Timur	212288867,6
Kota Balikpapan	128690625,4
Kota Samarinda	56518475,49

Kabupaten Bone	23848911,1
Kabupaten Gowa	17031568,77
Kota Palopo	27932563,36
Kabupaten Jayawijaya	1338867,818
Kabupaten Mamasa	3113964,214





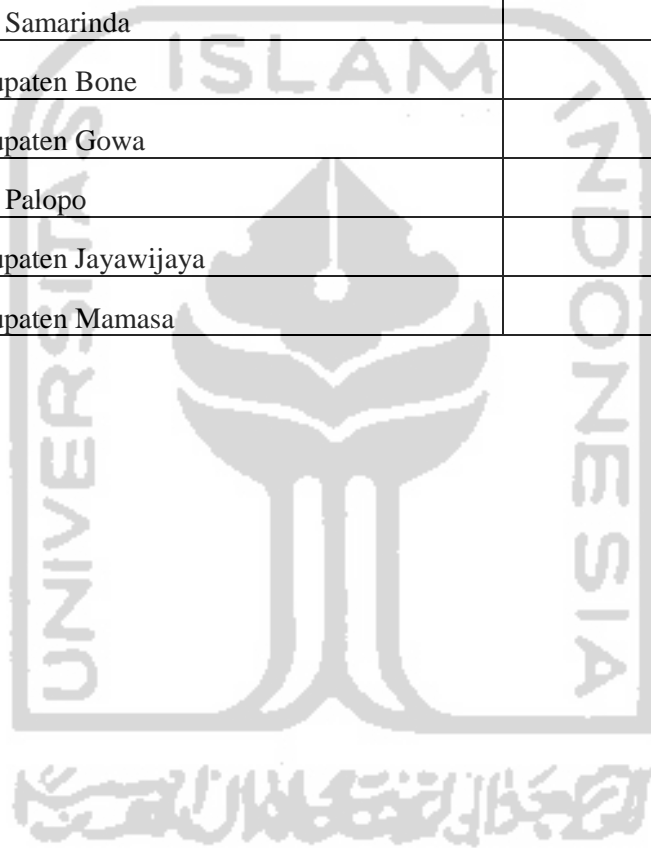
### LAMPIRAN 3

#### TABULASI VARIABEL DEPENDEN

Kabupaten dan Kota	TOTAL	INDEKS
Kota Banda Aceh	3	75%
Kota Lhokseumawe	3	75%
Kota Padang Panjang	4	100%
Kabupaten Bintan	4	100%
Kabupaten Kepulauan Anambas	3	75%
Kota Pekanbaru	3	75%
Kabupaten Lebong	3	75%
Kabupaten Bengkulu Utara	4	100%
Kabupaten Lebak	4	100%
Kabupaten Bandung	3	75%
Kabupaten Karawang	4	100%
Kabupaten Kebumen	3	75%
Kabupaten Kudus	3	75%
Kabupaten Magelang	4	100%
Kabupaten Tegal	4	100%
Kota Magelang	4	100%
Kabupaten Kulonprogo	4	100%
Kabupaten Sleman	3	75%
Kabupaten Gunungkidul	4	100%
Kabupaten Banjarnegara	4	100%
Kabupaten Batang	3	75%
Kabupaten Blora	4	100%
Kabupaten Boyolali	3	75%

Kabupaten Cilacap	4	100%
Kabupaten Pekalongan	4	100%
Kabupaten Purbalingga	4	100%
Kabupaten Wonosobo	4	100%
Kabupaten Rembang	3	75%
Kabupaten Semarang	4	100%
Kabupaten Sragen	3	75%
Kota Surakarta	4	100%
Kota Tegal	3	75%
Kabupaten Bantul	4	100%
Kabupaten Banyuwangi	4	100%
Kabupaten Lamongan	4	100%
Kabupaten Lumajang	4	100%
Kabupaten Gresik	3	75%
Kabupaten Pacitan	4	100%
Kabupaten Pamekasan	3	75%
Kabupaten Ponorogo	3	75%
Kabupaten Blitar	3	75%
Kabupaten Situbondo	4	100%
Kota Surabaya	4	100%
Kabupaten Bojonegoro	2	50%
Kota Malang	4	100%
Kabupaten Tabanan	4	100%
Kota Denpasar	3	75%
Kota Mataram	3	75%
Kabupaten Lombok Tengah	4	100%
Kabupaten Karangasem	4	100%
Kabupaten Ngawi	4	100%
Kabupaten Sampang	4	100%

Kabupaten Trenggalek	4	100%
Kabupaten Tuban	4	100%
Kabupaten Kotawaringin Barat	4	100%
Kabupaten Pulang Pisau	3	75%
Kabupaten Kutai Timur	4	100%
Kota Balikpapan	4	100%
Kota Samarinda	3	75%
Kabupaten Bone	4	100%
Kabupaten Gowa	4	100%
Kota Palopo	4	100%
Kabupaten Jayawijaya	4	100%
Kabupaten Mamasa	3	75%



## LAMPIRAN 4

### SPSS OUTPUT

#### A. Statistik Deskriptif Variabel Kontinu

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Pemda	64	1222738376 767,29	4276467292 2352,50	4851598259 007,6890	59357708786 12,88300
Kinerja Keuangan	64	,03208869	,60828839	,1667073086	,0974933850 7
Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	64	7,00000000	76,02597403	34,63143447 69	13,91996081 491
Tingkat Kemakmuran Masyarakat	64	1338867,8	386418365,7	46630293,33 8	58229423,83 18
Valid N (listwise)	64				

#### B. Statistik Deskriptif Variabel Kategori

##### Statistics

Opini Audit		
N	Valid	64
	Missing	0
Mean		,98
Std. Deviation		,125
Minimum		0
Maximum		1

#### C. Frequency

##### Opini Audit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	non-WTP	1	1,6	1,6	1,6

WTP	63	98,4	98,4	100,0
Total	64	100,0	100,0	

## D. Uji Normalitas Sebelum Transformasi Data

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		64	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,51593714	
Most Extreme Differences	Absolute	,337	
	Positive	,192	
	Negative	-,337	
Test Statistic		,337	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,000 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000

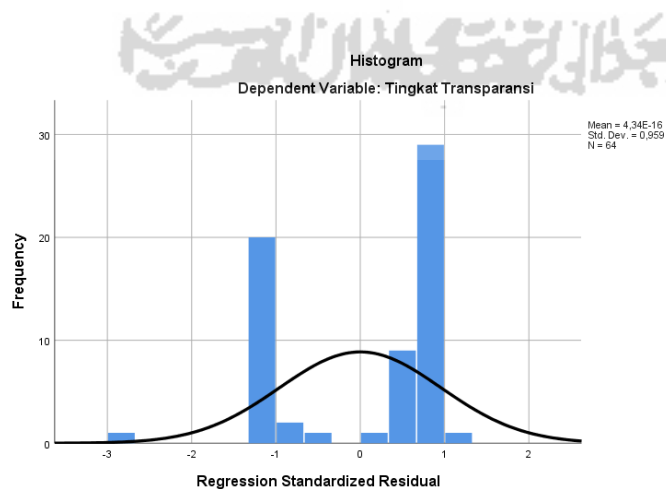
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

## E. Histogram Sebelum Transformasi Data



## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		64	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,13984727	
Most Extreme Differences	Absolute	,311	
	Positive	,175	
	Negative	-,311	
Test Statistic		,311	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,000 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,000
		Upper Bound	,000

a. Test distribution is Normal.

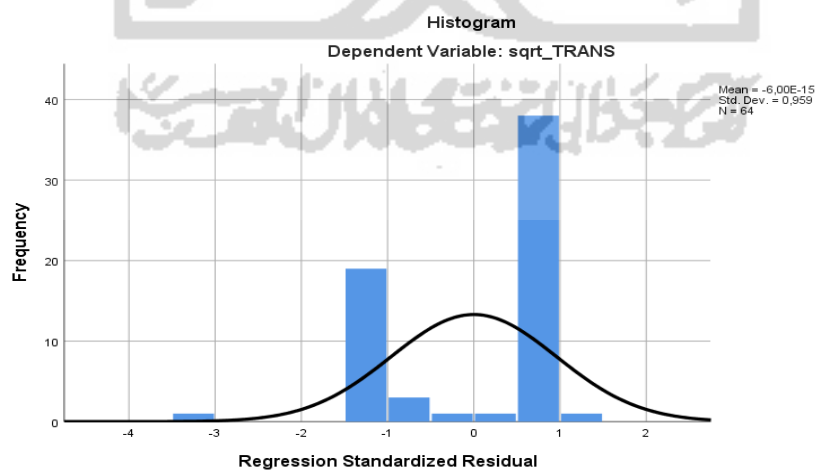
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

## F. Uji Normalitas Setelah Transformasi Data

## G. Histogram Setelah Transformasi Data



## H. Uji Normalitas Setelah *Outliers*

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		37	
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.16585467	
Most Extreme Differences	Absolute	.110	
	Positive	.069	
	Negative	-.110	
Kolmogorov-Smirnov Z		.668	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.763	
Monte Carlo Sig. (2- tailed)	Sig.	.722 <sup>c</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.710
		Upper Bound	.733

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

### I. Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	13.188	1.937		6.808	.000	
	Ukuran Pemda	-.187	.065	-.445	-2.901	.007	.493 2.027
	Kinerja Keuangan	2.216	.495	.727	4.481	.000	.441 2.269
	Opini Audit	.037	.183	.022	.200	.843	.982 1.019
	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	-.006	.002	-.294	-2.691	.011	.968 1.033
	Tingkat Kemakmuran Masyarakat	-.238	.037	-.770	-6.446	.000	.813 1.231

a. Dependent Variable: Tingkat Transparansi

## J. Uji Heteroskedastisitas



**Correlations**

	Ukura n	Kinerja Keuanga n	Opini Audit	Tindak Lanjut Rekomenda si Audit	Tingkat Kemakmura n	ABS_RE S		
Spearman' s rho	Ukuran Pemda	Correlatio n Coefficien t	1.000	.412*	.031	.138	.135	.266
		Sig. (2- tailed)	.	.011	.854	.415	.425	.111
		N	37	37	37	37	37	37
	Kinerja Keuangan	Correlatio n Coefficien t	.412*	1.000	.078	.126	.526**	.049
		Sig. (2- tailed)	.011	.	.646	.458	.001	.772
		N	37	37	37	37	37	37
	Opini Audit	Correlatio n Coefficien t	.031	.078	1.00 0	.125	.125	.281
		Sig. (2- tailed)	.854	.646	.	.461	.461	.092
		N	37	37	37	37	37	37
	Tindak Lanjut Rekomenda si Audit	Correlatio n Coefficien t	.138	.126	.125	1.000	-.128	.260
		Sig. (2- tailed)	.415	.458	.461	.	.449	.120
		N	37	37	37	37	37	37
	Tingkat Kemakmura n Masyarakat	Correlatio n Coefficien t	.135	.526**	.125	-.128	1.000	.241

	Sig. (2-tailed)	.425	.001	.461	.449	.	.151
	N	37	37	37	37	37	37
ABS_RES	Correlation Coefficient	.266	.049	.281	.260	.241	1.000
	Sig. (2-tailed)	.111	.772	.092	.120	.151	.
	N	37	37	37	37	37	37

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### K. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 <sup>a</sup>	.641	.583	.179

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemakmuran Masyarakat, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Opini Audit, Ukuran Pemda, Kinerja Keuangan

b. Dependent Variable: Tingkat Transparansi

### L. Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	1.766	5	.353	11.060	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.990	31	.032		
	Total	2.757	36			

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemakmuran Masyarakat, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Opini Audit, Ukuran Pemda, Kinerja Keuangan

b. Dependent Variable: Tingkat Transparansi

**M. Uji T**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.188	1.937		6.808	.000
	Ukuran Pemda	-.187	.065	-.445	-2.901	.007
	Kinerja Keuangan	2.216	.495	.727	4.481	.000
	Opini Audit	.037	.183	.022	.200	.843
	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit	-.006	.002	-.294	-2.691	.011
	Tingkat Kemakmuran Masyarakat	-.238	.037	-.770	-6.446	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Transparansi

## LAMPIRAN 5

### VERIFIKASI DATA

Sebelum melakukan analisis statistik, terdapat dua langkah verifikasi data untuk mengkonfirmasi keakuratan data. Langkah-langkah ini terdiri dari (1) verifikasi variabel dependen dan variabel independen yang datanya diperoleh dari laporan tahunan dan (2) verifikasi data dimasukkan dalam sebuah *file excel*.

Langkah Pertama: Verifikasi Variabel Dependen dan Variabel Independen

Seorang mahasiswa jurusan akuntansi diminta untuk menghitung ulang secara independen jumlah score dalam variabel tingkat transparansi dari 6 laporan keuangan pemerintah daerah yang dipilih secara acak mewakili 10% dari ukuran sampel. Selain itu, ia diminta untuk mengekstraksi ulang semua data secara terpisah terkait variabel independen dari 6 laporan tersebut (10% dari ukuran sampel). Data yang diekstraksi termasuk ukuran daerah, kinerja keuangan, opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan tingkat kemakmuran masyarakat. Hasil verifikasi ini kemudian dibandingkan dengan data yang diambil oleh peneliti. Toleransi kesalahan disepakati pada level 10%.

## Langkah Kedua: Verifikasi Data Dimasukkan Dalam *Excel*

Hasil verifikasi data *excel* dibandingkan dengan *file excel* aktual yang sebelumnya telah disiapkan oleh peneliti. Ditemukan bahwa ada sedikit perbedaan sebanyak 5% tingkat kesalahan, hasilnya memuaskan karena berada di bawah tingkat toleransi kesalahan yang telah disepakati. Data telah dibenarkan dan dikoreksi berdasarkan perbandingan sebelum melakukan analisis statistik.

